

**PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, EKSPOR BARANG
DAN JASA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI 9 NEGARA ASEAN**

(Skripsi)

Oleh:

LUSI SUSANTI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, EKSPOR BARANG DAN JASA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 9 NEGARA ASEAN

Oleh

LUSI SUSANTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari data *time series* tahun 2016-2020 dan *cross section* sembilan negara ASEAN. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN. Ekspor barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Korupsi, Ekspor Barang dan Jasa, Tingkat Pengangguran.

ABSTRACT

THE EFFECT OF CORRUPTION PERCEPTION INDEX, EXPORT OF GOODS AND SERVICES, AND UNEMPLOYMENT RATE ON ECONOMIC GROWTH IN 9 ASEAN COUNTRIES

By

LUSI SUSANTI

This study aims to analyze the effect of the corruption perception index, exports of goods and services and the unemployment rate on economic growth in nine ASEAN countries. The data used is panel data consisting of time series data for 2016-2020 and cross sections of nine ASEAN countries. The variables used are economic growth, corruption perception index, exports of goods and services, and the unemployment rate. The analysis tool used is panel data regression, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that the corruption perception index has no effect on economic growth in the nine ASEAN countries. Exports of goods and services have a positive and significant effect on economic growth in nine ASEAN countries. The unemployment rate has a negative and significant effect on economic growth in nine ASEAN countries.

Keywords: *Economic Growth, Corruption, Export of Goods and Services, Unemployment Rate.*

**PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, EKSPOR BARANG
DAN JASA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI 9 NEGARA ASEAN**

Oleh

LUSI SUSANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, EKSPOR BARANG DAN JASA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI 9 NEGARA ASEAN**

Nama Mahasiswa : **Lusi Susanti**

Nomor Induk Mahasiswa : **1951021022**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.
NIP 19601220 198903 1 004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

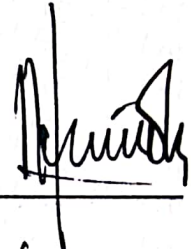
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Neli Aida', written over a horizontal line.

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002

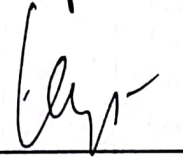
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

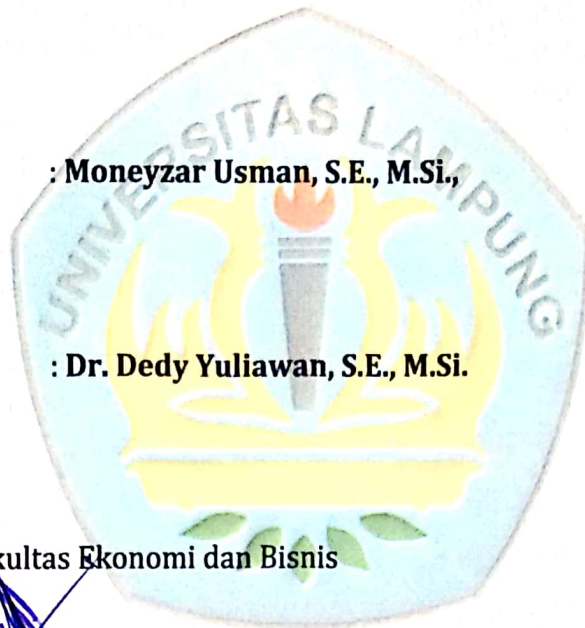
Ketua : Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.,



Penguji II : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Agustus 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023



Lusi Susanti

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Lusi Susanti, lahir di Pajarisuk pada tanggal 30 Agustus 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sumpeno dan Ibu Sartika.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) RA. Hidayatul Muttaqin Pamenang dan lulus pada tahun 2007. Lalu melanjutkan di SD Negeri 1 Pamenang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Satu Atap Pamenang dan lulus pada tahun 2016. SMK Yadika Pagelaran adalah tempat penulis menempuh pendidikan selanjutnya, dan lulus pada tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019 melalui jalur SMMPTN. Selama kuliah penulis mengikuti beberapa kegiatan organisasi kampus yaitu sebagai Anggota Bidang Usaha KOPMA dan Anggota Biro Galeri Investasi KSPM.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku seribu langkahku untuk maju”

(Lusi Susanti)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Apa-apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi.”

(Ardhi Mohamad)

“I have never been a natural, all I do is try, try, try”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta teriring shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan Karya Tulis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Sumpeno

Sartika

Terimakasih kepada Bapak & Mamak yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk kesuksesan penulis hingga saat ini. Berkat Bapak & Mamak lah semuanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran dalam mendidik, nasihat, cinta dan kasih sayang, serta lantunan doa yang tak pernah henti kalian berikan kepada penulis hingga menjadi kekuatanku dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Untuk Kakakku Tercinta

Atep Purnawan

Retno Wijayanti

Terimakasih atas semua doa serta dukungannya selama ini, terimakasih juga telah menjadi motivasi dan pengingatku selama hidup.

Serta

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

Semoga karya kecil ini bermanfaat

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Ekspor Barang dan Jasa, dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 9 Negara ASEAN”**.

Adapun maksud dalam penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung. Dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara Khusus, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta selaku dosen pembahas pada seminar hasil.
4. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh

kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

5. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas pada seminar proposal, seminar hasil dan dosen penguji yang telah memberikan waktu, kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas pada seminar proposal, seminar hasil dan dosen penguji yang telah memberikan waktu, kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E.,M.Si. selaku dosen pembahas seminar proposal yang telah memberikan waktu, kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Mimi, Ibu Yati, dan Bapak Kasim yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sumpeno dan Ibu Sartika terima kasih banyak telah memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang terbaik kepada penulis. Terima kasih telah merawat, menasehati, memotivasi, mendukung dalam keadaan apapun, dan mungkin mengorbankan banyak hal yang mungkin penulis tidak ketahui selama proses studi ini. Terima kasih banyak.
12. Kakakku tersayang, Mba Retno dan Mas Wawan. Terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang. Keponakanku tersayang, Zidan dan Zia. Anak kecil yang selalu mengobati rasa lelah dengan tingkah lucunya.
13. Teman-Teman semasa kuliah, Luluk, Lia, Siti, Zakiyya, Aini, Meling, Nova, Nafsiah, Desy, Amel, Gita dan Putri. Terima kasih atas semua kebaikan, motivasi, dan dukungan kalian dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

14. Devina, Putri, dan Erik. Terimakasih atas doa, dukungan dan kebersamaan semasa SMA hingga saat ini.
15. Rizkul dan Dedi. Terimakasih atas dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin.
16. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2019, dan teman-teman konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman KKN Desa Pandansari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Terima kasih atas cerita dan pengalaman bersama selama 40 hari.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap seoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Penulis

Lusi Susanti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan Teoritis | 12 |
| 1. Peran Pemerintah..... | 12 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi..... | 13 |
| 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar | 16 |
| 4. Korupsi | 17 |
| 5. Pandangan <i>The Sanders and The Greasers</i> | 21 |
| 6. Teori Perdagangan Internasional..... | 22 |
| 7. Ekspor..... | 24 |
| 8. Pengangguran | 25 |
| 9. Hukum Okun | 28 |
| B. Hubungan Antar Variabel | 29 |
| 1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | 29 |
| 2. Pengaruh Ekspor Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan | |

| | |
|--|-----------|
| Ekonomi | 30 |
| 3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | 30 |
| C. Tinjauan Empiris..... | 31 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 32 |
| E. Hipotesis Penelitian | 35 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Jenis dan Sumber Data..... | 36 |
| B. Definisi Operasional Variabel..... | 36 |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi..... | 36 |
| 2. Indeks Persepsi Korupsi | 37 |
| 3. Ekspor Barang dan Jasa..... | 37 |
| 4. Tingkat Pengangguran..... | 38 |
| C. Metode Analisis | 38 |
| D. Prosedur Analisis Data..... | 40 |
| 1. Metode Regresi Data Panel | 40 |
| 2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel..... | 41 |
| 3. Pengujian Asumsi Klasik | 43 |
| 4. Pengujian Hipotesis Statistik..... | 45 |
| 5. Koefisien Determinasi (R^2)..... | 47 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Analisis Statistik Deskriptif | 48 |
| 1. Pertumbuhan Ekonomi (PE)..... | 49 |
| 2. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) | 49 |
| 3. Ekspor Barang dan Jasa (EX)..... | 50 |
| 4. Tingkat Pengangguran (TP) | 50 |
| B. Hasil Regresi Model Data Panel | 51 |
| 1. Uji Chow | 51 |
| 2. Uji Hausman..... | 51 |
| C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik | 52 |

| | |
|--|------------|
| 1. Uji Asumsi Normalitas | 52 |
| 2. Uji Heteroskedastisitas | 53 |
| 3. Uji Multikolinearitas | 54 |
| 4. Uji Autokorelasi | 55 |
| D. Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel | 56 |
| E. Hasil Pengujian Hipotesisi | 57 |
| 1. Uji Parsial (Uji t) | 57 |
| 2. Uji Signifikansi Simultas (Uji F-Statistik) | 59 |
| 3. Koefisien Determinasi (R^2) | 59 |
| F. Pembahasan Hasil Penelitian | 60 |
| 1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN | 60 |
| 2. Pengaruh Eskpor Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN | 61 |
| 3. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN | 62 |
| 4. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Ekspor Barang dan Jasa, dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN | 64 |
| G. Individual Effect | 65 |
| V. SIMPULAN DAN SARAN..... | 94 |
| A. Simpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN..... | 116 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Tinjauan Empiris..... | 31 |
| 2. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data..... | 38 |
| 3. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi..... | 45 |
| 4. Hasil Analisis Deskriptif..... | 48 |
| 5. Uji Chow..... | 51 |
| 6. Uji Hausman..... | 52 |
| 7. Uji Heteroskedastisitas..... | 54 |
| 8. Uji Multikolinearitas..... | 54 |
| 9. Hasil Regresi..... | 56 |
| 10. Hasil Uji t-statistik Variabel Indeks Persepsi Korupsi..... | 58 |
| 11. Hasil Uji t-statistik Variabel Ekspor Barang dan Jasa..... | 58 |
| 12. Hasil Uji t-statistik Variabel Tingkat Pengangguran..... | 58 |
| 13. Hasil Uji F-Statistik..... | 59 |
| 14. Nilai <i>Individual Effect</i> Intersep 9 Negara ASEAN..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. <i>Gross Domestic Product</i> ASEAN Tahun 2016-2020 | 2 |
| 2. Indeks Persepsi Korupsi ASEAN Tahun 2016-2020 | 4 |
| 3. Ekspor Barang dan Jasa ASEAN Tahun 2016-2020 | 7 |
| 4. Tingkat Pengangguran ASEAN Tahun 2016-2020 | 9 |
| 5. Laju Pertumbuhan dan Perubahan Tingkat Pengangguran | 28 |
| 6. Skema Kerangka Pemikiran | 35 |
| 7. Hasil Uji Normalitas | 53 |
| 8. Hasil Uji Durbin-Watson | 55 |
| 9. Hasil Uji Durbin-Watson Penyembuhan Autokorelasi | 55 |

I. PENDAHULUAN

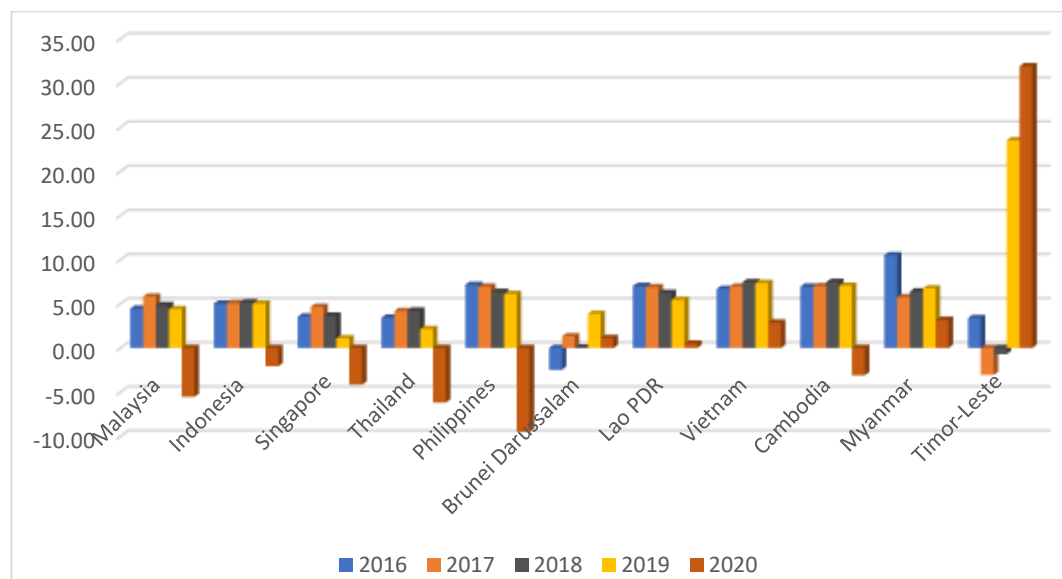
A. Latar Belakang

Keberhasilan kinerja pemerintah serta lembaga dan badan yang terkait dengan perekonomian diukur dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu negara untuk mencapai pembangunan ekonomi yang signifikan dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami kemajuan jika produksi barang dan jasanya meningkat dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan konsumsinya menjadi lebih tinggi (Febryani & Kusreni, 2017).

Kemajuan pertumbuhan ekonomi menjadi satu dari tujuan pencapaian pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, baik di level nasional maupun regional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yuliawan & Wanniatie, 2021). Dalam usaha peningkatannya perlu ada perencanaan yang hati-hati dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang direncanakan terkhusus untuk negara-negara berkembang. Hal ini karena, adanya ketidakmampuan negara dalam menyediakan modal yang cukup untuk menunjang pelaksanaan aktivitas ekonomi seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini lah yang mendasari pentingnya Kerjasama ekonomi internasional dalam mendukung pemenuhan akan kebutuhan terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebuah badan regional yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dibentuk di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang memiliki tujuan yang sama, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh para *Founding Fathers* ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan

Malaysia. ASEAN yang mulanya terdiri dari lima negara kemudian bertransformasi menjadi sepuluh negara anggota yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos PDR dan Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Namun, tahun 2022 dalam KTT ASEAN di Phnom Penh negara Timor-Leste bergabung sebagai anggota ke 11 ASEAN yang disetujui oleh para pemimpin masing-masing negara ASEAN (ASEAN, 2022). Organisasi tersebut didirikan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara-negara di kawasan ASEAN, terutama dalam bidang kebudayaan, sosial, dan ekonomi (A. C. P. Sari & Kaluge, 2018). Dibentuknya organisasi regional ini dikhususkan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi bagi negara anggota baik sejak dibentuk hingga dalam jangka waktu panjang.

Dalam melihat kondisi perekonomian di suatu negara dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan penting dalam menganalisis suatu masalah ekonomi makro sebagai dasar dalam mengambil kebijakan (Damanik & Saragih, 2023). PDB berfungsi sebagai penentu struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi (Rahman, 2015).



Sumber: *World Bank 2023*

Gambar 1. *Gross Domestic Product ASEAN Tahun 2016-2020*

Berdasarkan Gambar 1 diketahui pada tahun 2016 GDP tertinggi adalah Myanmar yaitu sebesar 10,51%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sedangkan negara dengan pertumbuhan GDP terendah adalah

Brunei Darussalam yaitu sebesar -2,48%. Pada tahun 2020 GDP ASEAN mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka minus. Rendahnya GDP ASEAN disebabkan karena adanya *Coronavirus Infectious Disease* 2019 atau COVID-19. Adanya Covid-19 menyebabkan negara-negara memberlakukan pembatasan sosial, karantina wilayah dan membatasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempersulit pergerakan barang dan jasa (Aeni, 2021). Pembatasan sosial dan karantina yang berlangsung lama tersebut menyebabkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah yang terdampak pandemi Covid-19.

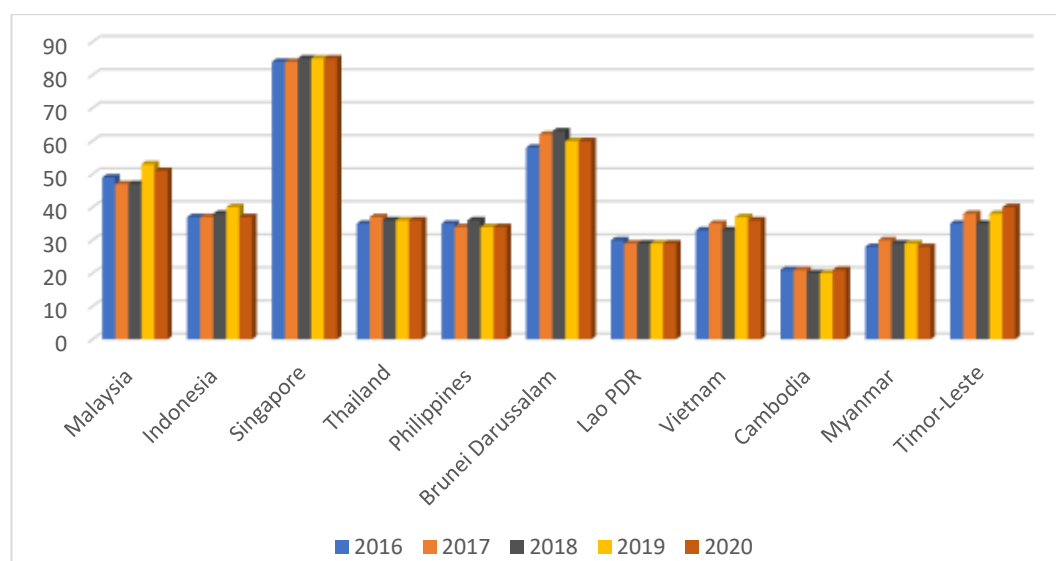
Dalam menangani pandemi Covid-19 secara keseluruhan di seluruh dunia menunjukkan perlunya integritas dalam manajemen krisis. Bahkan dalam pernyataan secara global, Ketua Dewan Direksi Transparansi Internasional juga menyatakan dengan jelas bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan ekonomi, tetapi juga krisis korupsi dan demokrasi (*Transparency International Indonesia*, 2021). Di banyak negara, korupsi melemahkan kemampuan negara untuk merespons keadaan darurat seperti krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Di tengah wabah Covid-19, korupsi terus-menerus merusak sistem perawatan Kesehatan dan menyebabkan demokrasi yang mengalami kemunduran. Negara-negara dengan kinerja indeks korupsi yang baik cenderung berinvestasi lebih banyak dalam perawatan kesehatan, namun faktanya negara-negara yang memiliki skor CPI yang tinggi juga memiliki tantangan korupsi yang cukup besar termasuk kurangnya transparansi dalam pengeluaran publik dalam menanggapi Covid-19 (*Transparency International Cambodia*, 2021).

Korupsi dalam kaitannya dengan perekonomian merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara di berbagai sektor termasuk sektor publik. Korupsi merupakan sebuah masalah yang memiliki efek domino yang luas terhadap eksistensi bangsa dan negara termasuk ASEAN. Dalam

memandang hubungan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, masih menjadi perdebatan panjang bagi para ekonom, sejarawan, dan ahli politik. Pandangan umum mengatakan bahwa korupsi dapat mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian (Nawatmi, 2014). Selain itu, adanya korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan menciptakan distorsi dan ketidak efisien yang tinggi. Tindak pidana korupsi juga termasuk dalam kejahatan *extra ordinary crime* yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya peradaban manusia (Damanik & Saragih, 2023).

Organisasi non-Pemerintah tingkat global yaitu *Transparency International* menilai tingkat korupsi di berbagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index (CPI)*. Menurut *Transparency International* skor CPI digunakan untuk memberi gambaran mengenai situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori (Suyatmiko, 2020). Indeks Persepsi Korupsi diukur dengan skala atau skor dari 0 sampai dengan 100, dimana 0 dianggap sangat korupsi dan 100 berarti tidak korupsi. Artinya, semakin tinggi CPI suatu negara, semakin bersih persepsinya (*very clean*). Sebaliknya, semakin rendah CPI, semakin korup persepsinya (*highly corrupt*). Berikut adalah data Indeks Persepsi Korupsi pada negara ASEAN tahun 2016-2020:



Sumber: *Transparency International 2023*

Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi ASEAN Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2 diketahui pada tahun 2016, Singapura menjadi negara dengan skor CPI terbesar yaitu 84. Setiap tahunnya Singapura selalu menjadi negara dengan peringkat teratas dengan persepsi yang lebih bebas dari korupsi dibanding negara anggota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di negara maju cenderung lebih rendah. Pada tahun yang sama, Kamboja dan Myanmar berada di tingkat terbawah dengan skor CPI sebesar 21 dan 28. Artinya tingkat korupsi Kamboja dan Myanmar relatif lebih tinggi dibanding negara anggota lain. Di tahun 2020 Singapura masih menjadi negara dengan skor CPI tertinggi yaitu sebesar 85. Sedangkan negara dengan skor CPI terendah adalah Kamboja dengan nilai sebesar 21. Selanjutnya, selama lima tahun terakhir skor CPI negara-negara ASEAN cenderung rendah, dalam *Transparency International* yang meliputi 177 negara menyatakan jika negara anggota ASEAN umumnya mendapat nilai di bawah 50 di mana CPI mempunyai skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat korup) (*Transparency International*, 2015).

Pada studi mengenai pengaruh korupsi terhadap perekonomian ada pihak yang bertentangan yakni pihak yang mendukung *Sand The Wheel Hypothesis* (SWH) dan yang mendukung *Grease The Wheel Hypothesis* (GWH). SWH menyebutkan korupsi memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian (Widana et al., 2020). Pendukung SWH adalah Mauro (1995), Mo (2001), menyatakan bahwa korupsi mempunyai hubungan negatif terhadap pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan dan sosial, pertumbuhan perekonomian, dan tingkat investasi. Korupsi dapat menyebabkan efisiensi suatu negara lebih rendah sehingga akan mempersulit proses pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, korupsi yang parah dapat memberi pengaruh buruk terhadap perekonomian karena akan menghambat masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Grease The Wheel Hypothesis (GWH) menyebutkan jika korupsi memiliki fungsi sebagai pelicin untuk perekonomian, artinya korupsi dapat memberi dampak positif bagi perekonomian (Widana et al., 2020). Pendapat GWH diasumsikan sebagai upaya untuk memperoleh surat izin dalam pendirian suatu perusahaan. Leff (1964), Lui (1985) menemukan jika korupsi bertindak sebagai insentif untuk membayar dan

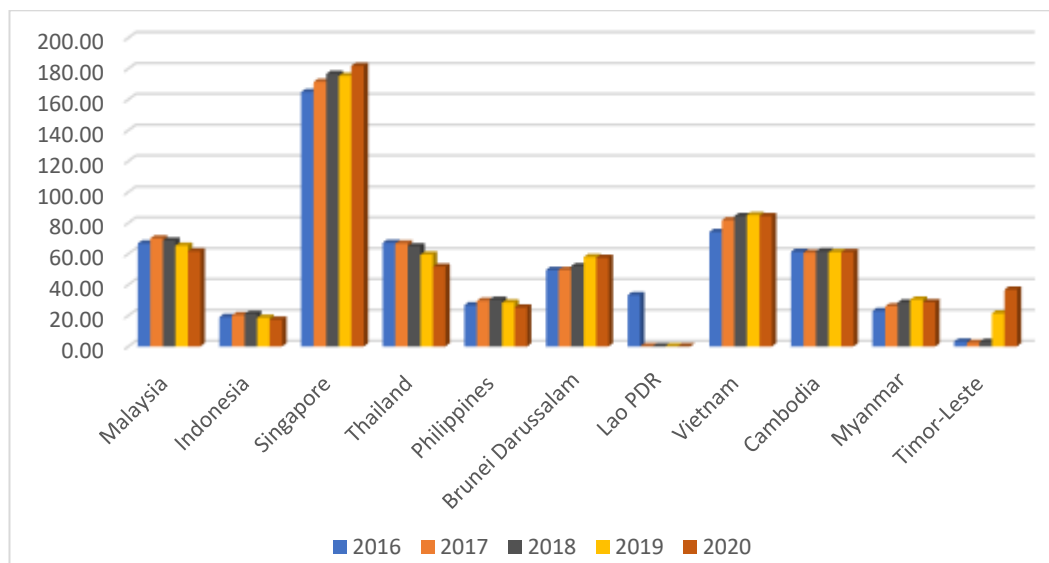
mempercepat peraturan pemerintah yang tidak efisien sehingga mempercepat birokrasi dan mendapatkan izin lebih cepat dengan menyuap pejabat publik.

Dalam perekonomian khususnya perdagangan internasional sering terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku bisnis. Persaingan tidak sehat tersebut merupakan bentuk persaingan antarpelaku bisnis melalui metode yang melawan hukum atau tidak jujur demi membuat persaingan bisnis terhambat yang memiliki efek negatif di sektor perdagangan. Dengan adanya persaingan tersebut, masalah korupsi juga menjadi implikasi etika bisnis yang signifikan dalam kegiatan ekspor dan impor. Praktik korupsi seperti suap dan pungli dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil dan merugikan masyarakat secara umum. Hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi isu yang penting dalam kegiatan ekspor dimana kurangnya regulasi yang efektif dan transparansi dapat memudahkan adanya Tindakan bisnis yang tidak etis (Putri, 2023).

Berbicara mengenai ekspor, ekspor memiliki peran utama dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhannya. Bila sebuah negara mempunyai nilai ekspor yang tinggi, maka akan semakin tinggi persentase *gross national product* bagi negara tersebut (Seto, 2022). Dalam *economic freedom*, ekspor barang dan jasa merupakan sumber penting negara dalam memperoleh devisa dalam kegiatan perdagangan internasional (Haryati & Hidayat, 2015). Devisa yang bersumber dari ekspor akan berguna sebagai pendanaan untuk impor barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan di tahap produksi yang akan meningkatkan nilai tambah (Shopia & Sulasmiyati, 2018). Negara-negara berkembang membutuhkan peningkatan kinerja ekspor sebagai penyeimbang kelangkaan sumber daya fisik dan finansial yang diperlukan untuk memulai pembangunan secara keceluruhan.

Penelitian mengenai hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi sudah ada sejak awal tahun 1960-an. Peran ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara selalu menjadi hal menarik untuk diteliti baik secara teoritis maupun empiris. Pertumbuhan ekspor yang baik akan meningkatkan cadangan devisa suatu

negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan dan menjaga ketahanan perekonomian negara dari krisis.



Sumber: *World Bank 2023*

Gambar 3. Ekspor Barang dan Jasa ASEAN Tahun 2016-2020

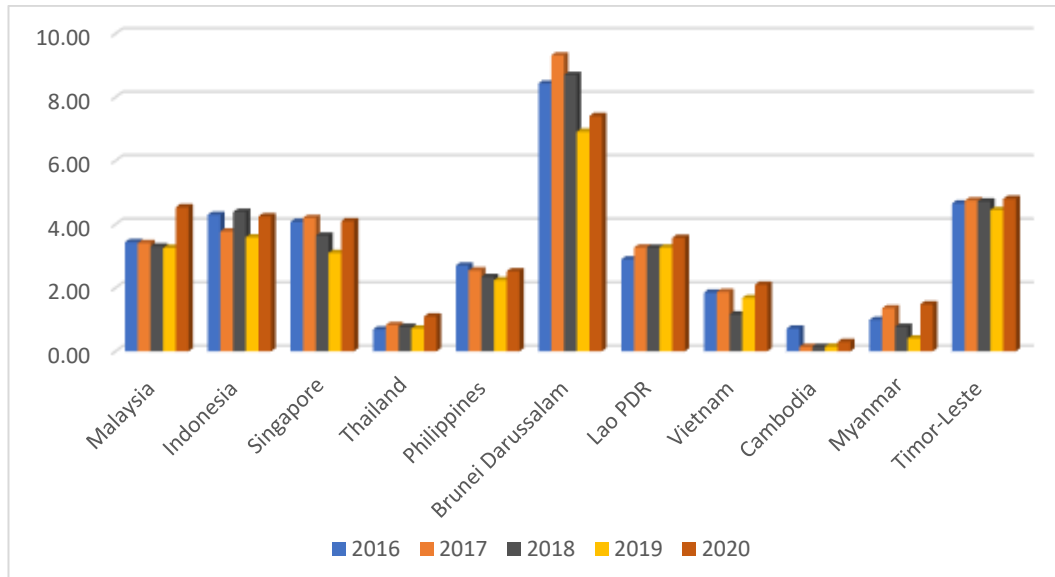
Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa pada tahun 2016 ekspor barang dan jasa tertinggi adalah Singapura yaitu sebesar 164,77%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Sedangkan negara dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa terendah adalah Timor-Leste yaitu sebesar 3,14%. Menurut data CEIC, pada tahun 2020 negara-negara ASEAN mengalami penurunan ekspor yang signifikan, terutama pada kuartal kedua penurunan terbesar adalah Indonesia yaitu 16539,59, diikuti oleh Malaysia sebesar 22598.333, Filipina sebesar 5854.058, Singapura sebesar 33133.374 dan -20075.576 untuk Thailand, Vietnam sebesar 27653.037, Brunei sebesar 600.061, Myanmar sebesar 1660,5, Kamboja sebesar 5930,6, dan Laos sebesar 1708,56 (Prayogi, 2023). Meskipun pada tahun 2020 ekspor negara-negara ASEAN mengalami penurunan, namun dalam *world bank* rata-rata pertumbuhan ekspor pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan yaitu 60,55% dibandingkan tahun sebelumnya 2019 sebesar 60,33%.

Ekspor ialah bagian dari perdagangan internasional yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai ekspor yang terus meningkat akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi melalui neraca perdagangan yang

bernilai surplus. Menurut penelitian yang dilakukan Shopia dan Sulasmiyati (2018), ekspor memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab peningkatan terhadap ekspor juga akan meningkatkan belanja agregat.

Perdagangan luar negeri khususnya ekspor, sangat ditentukan oleh bagaimana produksi berlangsung (Putra & Sutrisna, 2017). Dalam dunia komersial, produk yang dihasilkan dalam proses produksi sangatlah penting karena hasil dari kegiatan produksi tersebut menentukan jalannya usaha. Jika kegiatan produksi suatu negara rendah maka hasil produksinya hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tidak dapat diekspor. Apabila ekspor tidak terpenuhi dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu proses produksi sangat penting bagi keberlangsungan perdagangan luar negeri. Selain itu, dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor akan membantu menciptakan kesempatan kerja di suatu negara. Hal ini karena apabila ekspor meningkat, maka proses produksi suatu negara juga meningkat sehingga diperlukan adanya input tenaga kerja baru dan pada akhirnya pengangguran berkurang karena ada kesempatan kerja.

Di Setiap negara terutama negara berkembang, masalah ketenagakerjaan terutama pengangguran sulit untuk dihindari. Secara umum pengangguran sendiri merupakan masalah ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat selama wabah Covid-19 yang meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat wabah ini dan pekerja baru tidak berupaya mencari pekerjaan sebab tidak adanya lowongan untuk posisi baru (Coibion et al., 2020). Tingkat pengangguran yang meningkat di setiap negara dapat mengurangi kesejahteraan dan kemamkuran serta pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang terus menurun akan berakibat pada semakin terjebak dalam jurang kemiskinan dan akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.



Sumber: *World Bank 2023*

Gambar 4. Tingkat Pengangguran ASEAN Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa pada tahun 2016 tingkat pengangguran tertinggi adalah Brunei Darussalam sebesar 8,43% dan yang terendah adalah Thailand yaitu sebesar 0,69%. Kemudian pada tahun 2020 semua negara di ASEAN memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat pengangguran pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Covid-19. Peningkatan pengangguran selama pandemi Covid-19 didominasi oleh tingginya sejumlah orang yang kehilangan pekerjaan dibandingkan dengan pengangguran baru (Coibion et al., 2020). Hal ini karena disebabkan adanya kasus PHK ataupun merumahkan karyawan yang sebagian besar terjadi di usaha mikro atau industri rumah tangga/ kecil (Aeni, 2021). Banyaknya pengangguran akan menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang dan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam Hukum Okun. Menurut Hukum Okun, jumlah pengangguran akan berbandingterbalik dengan pertumbuhan negara. Menurut Mankiw, pertumbuhan produk domestik bruto hampir 2% mengurangi tingkat pengangguran hingga 1% (Iswanto, 2013).

Dalam *Transparency International* (2015) Selama 20 tahun terakhir, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal pendapatan perkapita. Namun, di sisi lain indeks korupsi dalam *Corruption Perception Index* (CPI) yang mencakup 177 negara menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN umumnya mendapat skor di bawah 50, dengan skor CPI mulai 0 (*highly corrupt*) sampai 100 (*very clean*) (Lutfi et al., 2020). Dari pernyataan tersebut timbul pertanyaan apakah skor CPI yang rendah di negara-negara ASEAN akan menurunkan pertumbuhan ekonomi atau justru dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi juga perlu diteliti lebih jauh lagi untuk membuktikan pandangan *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan *Sand the wheel hypothesis* (SWH). Selain itu, dalam pokok pikiran di atas diketahui bahwa *GDP Growth* negara ASEAN selama lima tahun terakhir cenderung menurun namun pertumbuhan ekspor barang dan jasa cenderung meningkat, sedangkan tingkat pengangguran cenderung tetap. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memilih nama topik penelitian **“Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Ekspor Barang dan Jasa, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
2. Untuk mengetahui pengaruh ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
4. Untuk mengetahui pengaruh indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran secara secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Guna memperoleh wawasan lebih mendalam mengenai pengaruh dari variabel indeks persepsi korupsi, ekspor jasa dan barang, serta tingkat pengangguran ke pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
- b. Bagi Instansi Pemerintah, Diharapkan dapat membantu instansi pemerintah dalam menganalisis pengaruh dari indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, serta tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
- c. Bagi Akademis, Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti berikutnya, terutama dengan topik penelitian yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terbukti dengan banyaknya kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik. Dalam pertumbuhan ekonomi, misalnya, didorong dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk melakukan intervensi dan menarik investor, mendorong peningkatan perkembangan teknologi dan mendidik atau menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh bursa tenaga kerja (Hamid, 1999). Adam Smith, yang dianggap sebagai *founder* atau pendiri dari ekonomi modern mengemukakan teorinya mengenai tiga fungsi pemerintah yaitu (Mangkosoebroto, 2016):

- a. Pemerintah berfungsi memelihara keamanan dan pertahanan dalam negara.
- b. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan.
- c. Pemerintah berfungsi untuk menyediakan barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti dam-dam, jalan dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern, peran pemerintah semakin penting dalam mengatur aktivitas perekonomian. Pemerintah mempunyai peran dalam mengatur, meningkatkan dan mengarahkan kegiatan sektor swasta. Hal ini karena, sektor swasta tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan perekonomian saat ini dan oleh karena itu perekonomian secara keseluruhan tidak dapat dipercayakan pada sektor swasta. Peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu (Mangkosoebroto, 2016):

- a. Peran Alokasi: yaitu dengan mengusahakan agar alokasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
- b. Peran Distribusi: terkait pendapatan, pemerintah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili masyarakat perlu menentukan kebijakan keuangan dan moneter untuk mencapai distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat.
- c. Peran Stabilisasi: Pemerintah memiliki peran penting dalam stabilisasi perekonomian karena perekonomian yang diserahkan kepada sektor swasta sangat rentan terhadap perubahan kondisi yang dapat menyebabkan inflasi dan pengangguran.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menjadi lebih baik secara terus-menerus, yang melibatkan peningkatan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara (Afif & Ciptawaty, 2020). Pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu negara dan berdampak pada peningkatan output barang dan jasa selama periode waktu tertentu (Aida et al., 2021). Menurut Mankiw pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur keberhasilan pembangunannya serta sebagai penentu kebijakan pembangunan selanjutnya (Rizky et al., 2022). Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat jika mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan pertumbuhan lambat terjadi jika negara tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu *gross domestic product* (Hussin & Saidin, 2012). Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan *Gross Domestic Product* (GDP) pada satu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Rizky et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{GDPT} - \text{GDPT-1}}{\text{GDPT}} \times 100$$

Dimana:

GDPt = *Gross Domestic Product* satu tahun sekarang

GDPt-1 = *Gross Domestic Product* satu tahun sebelumnya

Menurut Todaro (dalam Alisman, 2016), pertumbuhan ekonomi setiap negara dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

a. Akumulasi modal

Akumulasi modal dicapai dari tabungan dan investasi diluar pendapatan saat ini, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan output di masa depan. Produksi yang tinggi akan tercapai ketika modal fisik berupa peralatan dan bahan baku meningkat. Kemudian, investasi pada sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas secara lebih baik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Investasi tersebut dapat berupa pendidikan formal, pelatihan vokasi, jenis pendidikan informal lainnya dan sarana lain yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk suatu negara tentunya akan menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang merupakan faktor positif bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin besar peningkatan angkatan kerja disuatu negara akan mendorong peningkatan tenaga kerja yang produktif dan peningkatan penduduk yang besar akan membantu peningkatan pasar domestik menjadi lebih luas. Namun, hal ini tergantung bagaimana sistem perekonomian di suatu negara dalam menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara produktif.

c. Kemajuan teknologi

Sumber pertumbuhan ekonomi terpenting adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai peningkatan produksi, modal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Menurut Arifin (dalam Syahputra, 2017), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapat tersebut sesuai dengan yang dikatakan Mankiw (dalam Karlina, 2017), bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator utama dalam analisis makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Latumaerissa (2015), produk domestik bruto adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama satu tahun termasuk barang atau jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam negeri maupun penduduk luar negeri yang tinggal di negara yang bersangkutan. Menurut Manurung (dalam Larasati & Sulasmiyati, 2018), menyebutkan manfaat dari PDB adalah bahwa perhitungan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemakmuran suatu negara dengan cara dibagi jumlah penduduknya. PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dan mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Menurut Case & Fair (2007), untuk menghitung PDB dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Pendapatan

Metode penghitungan PDB yang dikenal sebagai pendekatan pendapatan menghitung pendapatan, upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor produksi selama proses pembuatan produk akhir. Pendekatan ini GDP melihat dalam hal siapa yang menerimanya sebagai pendapatan, bukan siapa yang membelinya. Karena tiap pembayaran (pengeluaran) oleh pembeli adalah penerimaan (pendapatan) bagi penjual. Artinya GDP dapat dihitung dalam hal siapa yang menerima pendapatan (Case & Fair, 2007).

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan seluruh uang yang dikeluarkan untuk semua barang dan jasa akhir selama periode tertentu. Menurut Karlina (2017), pendekatan pengeluaran terdiri dari empat kategori yaitu $GDP = C + I + G + (EX - IM)$: 1) pengeluaran konsumsi (*Consumption*) yaitu belanja rumah tangga dan swasta terhadap barang konsumen, 2) investasi (*Investment*) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sektor bisnis dan rumah tangga untuk membangun modal baru, seperti pabrik,

inventaris, peralatan, dan struktur perumahan baru, 3) investasi pemerintah atau konsumsi agregat pemerintah yang terdiri atas barang dan jasa (*Government*), 4) ekspor neto dikurangi impor (EX- IM) yaitu belanja neto oleh negara lain di dunia. Negara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi jika output dan pendapatan nasionalnya meningkat. Menurut Adam Smith (dalam Agma, 2015), menyatakan bahwa output dalam pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Sedangkan pendapatan nasional dapat dilihat dengan besarnya jumlah *Gross Domestic Product* (GDP).

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan teori yang dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Roy F. Harrod (1948) dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini merupakan perluasan dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes yang dirasa kurang lengkap untuk permasalahan ekonomi jangka panjang. Menurut Jhingan (dalam Rizky et al., 2022), Harrod-Domar menilai investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama mengenai sifat ganda investasi. Pertama, menghasilkan pendapatan atau mempengaruhi permintaan, dan kedua, meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dengan meningkatkan stok modal di bawah pengaruh pasokan. Dengan menganalisis pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*)
2. Keinginan untuk menabung adalah konstan ($MPS = s$)
3. Proses produksi memiliki koefisien tetap (*constant return to scale*)
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor.

Analisis Harrod Domar adalah alat analisis yang dimungkinkan oleh Keynesian. Analisis Keynesian melihat permasalahan ekonomi jangka pendek, dan analisis Harrod Domar melihat permasalahan jangka panjang. Dalam perekonomian terbuka, permintaan agregat terdiri dari empat komponen yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (E-M) atau dapat digambarkan dalam suatu model ekonomi makro $Y = C + I + G + (X - M)$. Dalam teori Harrod-Domar, yang dibutuhkan perekonomian adalah total belanja yang mencakup lebih banyak komponen yaitu belanja pemerintah dan ekspor (Deprianto et al., 2011).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah. Namun dalam kenyataannya, pemerintah harus memperhitungkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang (Mangkosoebroto, 2016). Teori Harrod-Domar menekankan bahwa untuk mencapai tingkat *steady growth* dalam perekonomian terletak pada peran aktif investasi (Jhingan, 1975). Besarnya investasi pada suatu negara akan memberi kontribusi pada percepatan perekonomian, khususnya bagi negara berkembang. Landasan pemikiran Harrod-Domar adalah instrumen investasi memegang peranan penting dalam perekonomian, terutama sebagai sumber pendapatan dan modal untuk meningkatkan produksi.

4. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*. *Corruption* dimasukkan oleh Aristoteles dalam buku *de generatione at corruption* yang artinya penurunan atau perubahan tidak terkait dengan uang atau kekuasaan (Aprilia & Islahuddin 2019). Seiring berjalannya waktu, kata “korupsi” mengalami pergeseran yang kemudian menghubungkan dengan kekuasaan sebagaimana tertulis dalam suratnya pada *Uskup Mandell Creighton* yang berisi “*power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak benar-benar korup. Sejak adanya pernyataan tersebut, korupsi selalu

dikaitkan dengan kekuasaan dan perbuatan yang merugikan masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu.

Definisi korupsi menurut *World Bank*, sebagai penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara demi meraih keuntungan pribadi maupun kelompok (*the abuse of public office for personal gain*) (Indriati, 2014). *Transparency International* (TI), mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan, untuk keuntungan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*). Korupsi merupakan kegiatan menawarkan, menerima, memberi, atau meminta sesuatu yang berharga secara tidak langsung maupun langsung untuk mempengaruhi tindakan orang lain.

Korupsi yang kian marak di suatu negara terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu seperti kepemimpinan elit bangsa, gaji pegawai negeri yang rendah, dan komitmen, konsistensi penegak hukum, serta peraturan perundang-undangan yang lemah. Politik merupakan salah satu penyebab korupsi. Perilaku korupsi seperti penyuapan dan *money politics* adalah suatu hal yang umum terjadi (Widyanto & Ulfah, 2018). Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa korupsi terjadi adalah sebagai berikut (Wilhelmus, 2018):

a. Teori Jack Bologne

Teori ini mengatakan bahwa korupsi terjadi sebagai akibat dari keserakahan dan ketamakan. Jack Bologne dalam teori ini menggunakan akronim “GONE” meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Keempat variabel tersebut apabila digabungkan akan membuat seseorang melakukan korupsi dengan mudah. *Greeds* yaitu keserakahan yang timbul akibat adanya kesempatan yang lebar (*opportunity*), yang kemudian diperkuat dengan adanya kebutuhan (*needs*) sehingga menggerakkan seseorang untuk melakukan korupsi dengan mudah. Kemudian, keinginan tersebut didukung dengan lemahnya kondisi hukum yang tidak jelas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi (*expose*).

b. Teori Vroom

Dalam teori ini, Vroom menjadikan variabel *value*, *expectation*, dan *motivation* sebagai dasar seseorang untuk bertindak. Sumber motivasi seseorang bergantung pada harapan yang ingin mereka capai. Apabila seseorang ingin kaya maka motivasi kerjanya menjadi kaya. Masalah muncul ketika kemampuan seseorang yang ingin menjadi kaya seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan (*expectation*). Dalam situasi ini, nilai atau value seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar atau salah (koruptif). Jika dikaitkan dengan korupsi, value yang ada pada seorang koruptor adalah nilai ketidakjujuran, kejahatan, ketidakadilan. Nilai inilah yang kemudian menyebabkan seseorang untuk memperkaya diri melalui cara yang salah dengan melanggar hukum.

c. Teori Klitgaard

Teori ini menggambarkan korupsi yang terjadi akibat pembuat kebijakan (pejabat pemerintah) yang memiliki kekuatan atau otoritas tertentu. Klitgard menyebutkan bahwa korupsi yang terjadi pada pembuat kebijakan atau pejabat pemerintah karena adanya monopoli kekuasaan (*monopoly of power*) yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan kekuasaan yang tinggi (*discretion of official*) serta pengawasan yang kurang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*). Robert Klitgaard menyebutkan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi berikut $M+D-A=C$. M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban).

Organisasi non-Pemerintah tingkat global *Transparency International* (TI) setiap tahun mengeluarkan hasil survei mengenai korupsi yaitu dikenal dengan *Corruption Perception Index* (CPI) yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 (Suyatmiko, 2020). Menurut *Transparency International*, responden survei CPI adalah pengusaha, analis bisnis, dan masyarakat biasa yang telah menilai sejauh mana korupsi memasuki lembaga-lembaga publik dan sektor pemerintah di suatu negara. Indeks persepsi korupsi berfungsi untuk menilai serta memeringkat negara-negara di dunia berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik.

Transparency international (TI) mengukur *Corruption Perception Index* (CPI) dengan menggunakan skor antara 0-100. Skor 0 mengindikasikan semakin buruk korupsi (*highly corrupt*) yang terjadi di suatu negara, sedangkan skor indeks 100 menandakan suatu negara bersih dari korupsi (*very clean*) (Ichavani & Sasana, 2019). Dalam *Transparency International*, nilai 0 menunjukkan bahwa sebagian besar orang atau analis yang disurvei percaya bahwa korupsi sangat merajalela dalam negara tersebut, sehingga tingkat kepercayaan terhadap integritas sektor publik sangat rendah. Sebaliknya, nilai 100 menunjukkan bahwa sebagian besar orang atau analis yang disurvei percaya bahwa korupsi hampir tidak ada atau jarang terjadi di negara tersebut, sehingga tingkat kepercayaan terhadap integritas sektor publik sangat tinggi. Artinya, semakin tinggi skor CPI suatu negara, semakin baik negara tersebut dinilai dalam hal integritas dan transparansi di sektor publiknya.

Menurut *Transparency International* (TI) untuk menghitung indeks persepsi korupsi dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh *World Bank* dan *World Economic Forum* serta perusahaan konsultan dan Lembaga pemikir dan risiko swasta. Sumber data berbeda yang digunakan untuk menghitung CPI mengukur berbagai aspek korupsi di sektor publik. Mulai dari penyusunan, pengalihan dana publik, penuntutan kasus korupsi, kerangka hukum yang memadai, akses ke informasi, perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik. Korupsi secara umum melibatkan aktivitas ilegal, yang sengaja disembunyikan dan hanya terungkap melalui skandal, investigasi, atau penuntutan. CPI tidak mengukur aktivitas seperti penipuan pajak, pencucian uang, kerahasiaan keuangan atau aliran uang terlarang.

Untuk memastikan metodologi CPI dan hasilnya dapat diandalkan, indeks tersebut ditinjau secara berkala oleh *independent evaluators*. Tinjauan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa CPI koheren secara statistik dan konseptual. Pada akhirnya, CPI adalah indikator pengukuran korupsi yang paling banyak digunakan karena cakupan globalnya yang luas serta fakta bahwa CPI merekonsiliasi berbagai sudut pandang mengenai apa yang merupakan korupsi sektor publik. Data indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan setiap tahun oleh *Transparency International*

(TI) kevalidan datanya dipercaya oleh banyak pihak dalam mengukur praktik korupsi di suatu negara.

5. Pandangan *The Sanders and The Greasers*

Hubungan mengenai korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam pandangan *The Sanders and The Greasers*. Menurut Aidt (2009), pengaruh korupsi pada pertumbuhan ekonomi dikelompokkan dalam dua pandangan yang saling berseberangan. Pandangan pertama adalah “*greasers*”, yaitu pandangan yang meyakini bahwa korupsi memberikan kontribusi yang efisien akan “melicinkan roda perdagangan”. Leff (1964), merupakan salah satu peneliti yang membuka gagasan ini. Menurutnya, dalam beberapa situasi korupsi dapat berdampak positif pada pertumbuhan investasi dan ekonomi. Ini didasarkan pada korupsi, sehingga suatu negara dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan, yang tidak akan terjadi kecuali korupsi adalah komponen persamaan. Menurut Huntington (dalam Ichvani. et al., 2019) korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena:

1. Korupsi berperan sebagai insentif finansial sehingga pengusaha dapat menghindari adanya keterlambatan.
2. Korupsi dapat menguntungkan ekonomi karena dapat membentuk pasar gelap dan meningkatkan efisiensi penyelundupan.
3. Korupsi meningkatkan efisiensi jika sektor swasta bersifat efisien daripada sektor publik dalam mengalokasikan sumbernya melalui struktur pajak.

Selanjutnya pandangan kedua adalah “*sanders*”. Pandangan ini terdiri dari para ekonomi yang melakukan penelitian dengan menggunakan hipotesis “*sand of the wheels*”. Pandangan ini meyakini bahwa korupsi merupakan pengganggu dalam perekonomian. Mauro (1995), menyatakan bahwa para peneliti mengakui bahwa korupsi yang dilakukan pejabat publik dapat berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang telah meningkat secara substansial. Menurut Mauro (dalam Ichvani, Lutfiana Fiqry & Sasana, 2019), korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena:

1. Korupsi menghambat masuknya investasi
2. Korupsi menimbulkan distorsi bagi pertumbuhan sektor non formal dan perkembangan perusahaan
3. Korupsi menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik serta memperburuk infrastruktur fisik (Tanzi, 1998).

6. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara suatu negara dengan warga negara negara lain berdasarkan kesepakatan bersama; contohnya adalah perdagangan antara individu, pemerintah, atau pemerintah suatu negara dengan negara lain (Apridar, 2018).

Menurut teori perdagangan internasional, semua negara yang terlibat dalam hubungan dagang antar negara akan terdorong untuk melakukan spesialisasi dalam produksi dan ekspor barang-barang tertentu yang memiliki keunggulankomparatif. Dengan demikian, setiap negara akan berkonsentrasi pada produksinya sendiri, sehingga output global akan meningkat dan semua negara yang terlibat akan mendapatkan keuntungan (Salvatore, 1997).

Salah satu penggerak utama peningkatan PDB adalah perdagangan internasional. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut (Apridar, 2018):

- a. Suatu negara dapat membeli barang-barang yang tidak dibuat di negaranya sendiri melalui perdagangan internasional. Hal ini karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi setiap negara seperti adanya perbedaan iklim, geografis, dan penguasaan teknologi yang memungkinkan beberapa negara tidak bisa memproduksi barang yang diproduksi di negara lain.
- b. Manfaat dari spesialisasi. Kegiatan utama perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan melalui spesialisasi. Meskipun setiap negara memproduksi barang yang sama dengan negara lain, terkadang negara tersebut mengimpor dari negara lain.

- c. Memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Berkat perdagangan internasional, perusahaan dapat mengelola peralatan produksi secara optimal dan menjual kelebihan produk ke luar negeri.
- d. Manfaat transfer teknologi modern. Adanya perdagangan luar negeri memungkinkan setiap negara mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan efisien.

Terdapat beberapa teori dalam perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut (Hasoloan, 2013):

a. Model Ricardian

Model ini lebih menghususkan dalam memproduksi apa yang paling mereka kuasai atau paling baik untuk diproduksi. Kerangka kerja model ini yaitu memprediksi negara-negara yang dapat menjadi spesialis secara penuh dibandingkan dengan memproduksi banyak macam barang komoditas.

b. Model Heckscher-Ohlin

Teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional terjadi karena timbulnya *opportunity cost* suatu produk antara satu negara dengan negara lain yang disebabkan karena terdapat perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) di tiap negara (Apridar, 2018). Negara dengan faktor produksi murah dan langka akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor produk tersebut. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi langka dan mahal akan mengimpor produk tertentu.

c. Model Gravitasi

Pada dasarnya model ini berpendapat bahwa perdagangan terjadi karena berdasarkan jarak dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang memperhitungkan jarak dan ukuran fisik antara dua benda. Model ini terbukti kuat oleh analisis ekonometri.

7. Ekspor

Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan antar negara, yang mana nantinya akan timbul pertukaran produk barang dari satu negara ke negara lain. Pengiriman barang dari satu negara ke negara lain terjadi karena adanya permintaan barang dari pembeli di negara yang bersangkutan atau disebut dengan perdagangan ekspor. Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan usaha jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus hingga memperoleh keuntungan (Nurhakim & Satar, 2015). Ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Sektor ekspor yang unggul merupakan pendorong utama bagi perekonomian di sebagian besar negara di Asia (Apridar, 2018).

Ekspor merupakan upaya dalam melakukan penjualan komoditi yang dimiliki oleh suatu negara kepada negara asing, dimana pemerintah mengharapkan adanya pembayaran dalam bentuk valuta asing dan dalam kegiatan transaksinya menggunakan bahasa asing. Hasil yang diperoleh dari perdagangan ekspor adalah sejumlah uang dalam valuta asing atau disebut dengan devisa yang juga merupakan sumber pemasukan suatu negara (Primandari, 2017).

Fungsi penting dari adanya perdagangan ekspor adalah suatu negara akan memperoleh keuntungan dengan meningkatnya pendapatan nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Risa (2018), dalam pelaksanaan kegiatannya, terdapat beberapa cara dalam pembayaran transaksi ekspor:

a. *Advance Payment* (Pembayaran di Muka)

Advance payment merupakan cara pembayaran transaksi ekspor yang mana importir (*buyer*) melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir (*seller*) sebelum barang yang bersangkutan dikirimkan kepada importir (*buyer*). Kelemahan sistem ini dapat merugikan importir apabila eksportir tidak mengirimkan produk atau barang (Wanprestasi) seperti perjanjian awal dan tidak memiliki bukti autentik jika diajukan pada pihak berwajib.

b. *Open Account* (Pembayaran Kemudian)

Eksportir melakukan pengiriman barang terlebih dahulu sebelum importir membayar. Kelemahan sistem ini dapat merugikan pihak eksportir apabila importir tidak melakukan pembayaran atas barang dagangannya dan tidak memiliki dokumen autentik jika diajukan pada pihak berwajib.

c. *Collection Basis* (Inkaso)

Inkaso merupakan pembayaran transaksi ekspor dengan teknik yang sama seperti *open account*. Bedanya dalam *collection basis* yaitu eksportir akan memiliki bukti autentik dan kepastian pembayaran atas barang yang dikirimkan pada importir.

d. *Banker's Letter of Credit* (L/C)

Sistem pembayaran ekspor L/C menjamin bahwa bank pembuka L/C akan membayar eksportir. Ini menjamin kepentingan baik importir maupun eksportir. Eksportir akan memperoleh jaminan atas barang yang diekspor jika syarat dalam L/C terpenuhi. Untuk importir, bank memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir berdasarkan dokumen L/C.

e. *Consignment* (Konsinyasi)

Konsinyasi yaitu ketika Importir menerima barang dari eksportir sebagai titipan untuk dijual kembali dengan harga yang telah ditetapkan. Jika barang tersebut terjual, eksportir akan menerima hasil penjualan, dan importir akan menerima komisi atas barang yang dijual dengan sukses.

8. Pengangguran

Pengangguran dalam pemahaman masyarakat merupakan suatu kondisi dimana seseorang berada pada kondisi pasif (Ayu & Husaini, 2013). Pengangguran merupakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetapi masih aktif mencarikerja. Agar dapat terhitung sebagai pengangguran, Seseorang harus melaporkan semua upaya yang dilakukannya untuk mencari pekerjaan, seperti melakukan wawancara kerja atau menulis surat lamaran, agar mereka dianggap pengangguran (Samuelson

& Nordhaus, 2004). Istilah pengangguran (*unemployment / jobless*) mengacu pada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang berusaha memperoleh pekerjaan (Halim, 2012). Dalam standar internasional, pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan upah tertentu, tetapi tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan (Sugianto & Peadhy, 2020). Secara umum pengangguran terjadi karena terdapat ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah angkatan kerja tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja yang mampu untuk menyerapnya. Permasalahan perekonomian seringkali disebabkan oleh adanya pengangguran yang tinggi, produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang serta banyaknya masalah sosial merupakan akibat dari tingginya pengangguran.

Menurut Franita & Fuady (2016) terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pengangguran:

- a. Ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas dalam menampung pencari kerja.
- b. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja.
- c. Informasi yang tidak merata, yang berarti pencari kerja tidak dapat menemukan banyak informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja.
- d. Lapangan kerja yang tidak merata.
- e. Upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan softskill kurang maksimal.
- f. Budaya pencari kerja yang malas, yang membuat pencari kerja lebih mudah menyerah.

Pengangguran dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, tingkat keterampilan atau pendidikan, dan kelompok etnik, pengangguran juga dapat dikelompokkan menurut lokasi geografis, jenis pekerjaan, menurut lamanya waktu menganggur, atau berdasarkan alasan menganggur (Lipsey et al., 1997). Dalam penelitian ini akan membahas jenis pengangguran berdasarkan alasannya.

a. Pengangguran Siklis (*cyclical unemployment*)

Pengangguran siklis merupakan peningkatan pengangguran yang terjadi selama resesi dan depresi (Case & Fair, 2007). Masalah dasarnya adalah perusahaan akan memproduksi lebih sedikit. Perlu diketahui bahwa resesi akan menyebabkan turunnya GDP riil. Ketika perusahaan melakukan pemotongan pekerja atau berproduksi lebih sedikit, artinya perusahaan mempekerjakan pekerja dan modal yang lebih sedikit pula.

b. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang muncul karena pekerja tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai ketersediaan pekerja dan perlu terlibat dalam proses pencarian kerja yang memakan waktu (Acemoglu et al., n.d.). Pengangguran friksional terjadi karena adanya perputaran (*turnover*) normal tenaga kerja. Pengangguran friksional didefinisikan sebagai pengangguran muda yang memulai karir dan sedang mencari pekerjaan, serta pengangguran yang dipecat atau tidak puas dengan keadaan kerja mereka saat ini (Lipsey et al., 1997). Banyaknya alasan yang mungkin terjadi, pastinya mereka perlu untuk mencari pekerjaan baru yang tentunya memerlukan waktu. Pengangguran friksional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang terus menganggur meskipun sedang mencari pekerjaan.

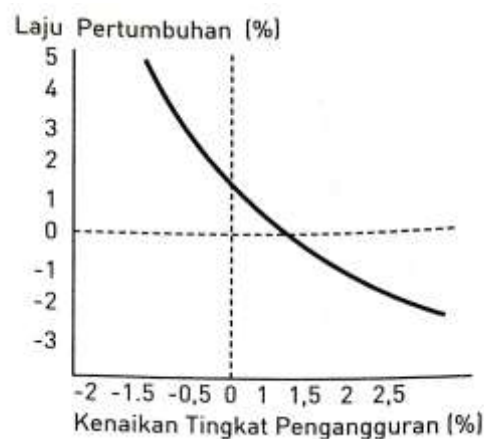
c. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Pengangguran struktural diartikan sebagai pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri, atau lokasi geografis dengan struktur angkatan kerja secara keseluruhan (Lipsey et al., 1997). Pengangguran struktural dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan struktur dalam kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian, tidak semua industri dan perusahaan akan mengalami perkembangan yang lebih maju dari sebelumnya, sebagian dari mereka akan mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu: adanya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan produk lama, biaya produksi yang tinggi, jumlah

ekspor produksi akan menurun karena bersaing ketat dengan negara lain. Perusahaan akan mengalami penurunan kegiatan produksi akibat kemerosotan ini, yang pada gilirannya akan menyebabkan PHK dan pengangguran (Hasyim, 2016).

9. Hukum Okun

Menurut Blanchard (Febryani & Kusreni, 2017), hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan output adalah negatif. Hukum okun (okun) menggambarkan hubungan antara pertumbuhan riil dan perubahan tingkat pengangguran. Arthur Okun pada tahun 1962 menemukan adanya kaitan erat mengenai tingkat pengangguran dengan GDP riil (Hasyim, 2016). Hukum okun (okun) menggambarkan hubungan antara pertumbuhan riil dan perubahan tingkat pengangguran. Hubungan ini sangat penting untuk pedoman kebijakan karena memungkinkan kita untuk mempertanyakan bagaimana target laju pertumbuhan tertentu akan mempengaruhi tingkat pengangguran dari waktu ke waktu.



Sumber: Hasyim, 2016

Gambar 5. Laju Pertumbuhan dan Perubahan Tingkat Pengangguran

Tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan tingkat pengangguran, dan tingkat pertumbuhan yang rendah akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. dalam situasi di mana tingginya pengangguran dan sumber daya yang dimiliki tidak dialokasikan secara efektif, rendahnya pendapatan masyarakat dan tingkat keseimbangan daya beli masyarakat menurun. Sebagai *multiplier effect*, konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa menurun

dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika konsumsi masyarakat menurun atas permintaan barang dan jasa juga akan menurun, dan dalam menanggapi hal ini produsen akan menurunkan tingkat produksi barang dan jasa.

Hukum Okun menggambarkan pergerakan dari output dan pengangguran yang kemudian menjelaskan bahwa setiap penurunan produk domestik bruto sebesar 2% menyebabkan peningkatan pengangguran sebesar 1%. Hukum Okun menjelaskan pentingnya hubungan antara pasar tenaga kerja dan produksi, yang menggambarkan fluktuasi jangka pendek PDB dan perubahan tingkat pengangguran, maka jika kita berasumsi bahwa output dan tingkat pengangguran berubah secara bersamaan serta perubahan jumlah pekerjamenunjukkan adanya perubahan terhadap pengangguran (Samuelson, dalam Sari et al., 2019).

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan *Transparency International*, tingkat korupsi di suatu negara dapat diukur dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan skor 0-100: yaitu semakin mendekati nol artinya suatu negara sangat korup sedangkan semakin mendekati 100 suatu negara bersih dari korup. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) suatu negara menunjukkan maraknya korupsi di negara tersebut. Hal ini akan mengkhawatirkan bila dalam suatu negara tidak ada kebijakan yang mampu menangani korupsi. Apabila korupsi tidak ditangani dengan baik maka korupsi akan semakin parah dan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kondisi perekonomian dengan menghambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar orang berpendapat bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dan mengganggu alokasi sumber daya ekonomi. Menurut Blackburn (Nawatmi, 2014), banyak ekonom berpendapat bahwa korupsi adalah penghambat utama dalam pembangunan. Korupsi juga menjadi penyebab rendahnya pendapatan dan berperan besar dalam menciptakan jebakan kemiskinan.

2. Pengaruh Ekspor Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan perdagangan ekspor yang dilakukan di suatu negara akan berakibat pada meningkatnya permintaan mata uang bagi negara pengekspor sehingga mata uang akan terus menguat (Sedyaningrum et al., 2016). Menurut Salvatore (dalam Shopia & Sulasmiyati, 2018), perdagangan ekspor berperan sebagai mesin pertumbuhan bagi negara berkembang. Produksi domestik yang meningkat akan menghasilkan lebih banyak input tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu ekspor yang kian meningkat menunjukkan bahwa keberlangsungan perekonomian di suatu negara berjalan dengan baik. Seperti dikemukakan oleh Shihab et al., (2014), ekspor barang dan jasa merupakan salah satu sumber utama pendapatan asing, dengan fokus pada keseimbangan pembayaran dan penciptaan kesempatan kerja. Selain itu, ekspor akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam *Okun's law* yang diambil dari nama Arthur Okun yaitu ekonom yang mempelajari untuk pertama kalinya. Okun mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran memiliki hubungan Pengangguran terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja terkait dengan investasi, sedangkan investasi berasal dari akumulasi tabungan. Tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin besar pula harapan untuk memperluas produksi yang tentunya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja (Septiatin et al., 2016).

C. Tinjauan Empiris

Tabel 1. Tinjauan Empiris

| No | Peneliti | Judul | Alat Analisis | Hasil |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Sri Nawatmi (2014) | Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik | Variabel : GDP, indeks korupsi (CPI), FDI, populasi, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran pendidikan. Alat Analisis : Analisis Data Panel | Temuan studi menunjukkan jika variabel indeks korupsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 12 negara Asia Pasifik. Artinya korupsi bukanlah <i>grease of wheel</i> atau pelican roda perekonomian. Variabel FDI serta pengeluaran kesehatan berdampak signifikan positif ke pertumbuhan ekonomi. |
| 2. | Nurhaliza Pico (2020) | Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2013-2017 | Variabel : Pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan impor. Alat analisis: Analisis Data Panel | Temuan studi memperlihatkan jika variabel ekspor dan impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di negara-negara ASEAN tahun 2013-2017. |
| 3. | Lutfiana Fiqry Ichavani dan Hadi Sasana (2019) | Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5 | Variabel : GDP, keterbukaan perdagangan, pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan CPI. Alat Analisis : Analisis Data Panel | Temuan studi menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN dipengaruhi secara positif oleh variabel CPI. Sementara variabel penjelas lainnya seperti keterbukaan perdagangan berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian di lima negara ASEAN serta konsumsi dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif. |

Tabel 1. (Lanjutan)

| No | Peneliti | Judul | Alat Analisis | Hasil |
|----|--|---|---|---|
| 4. | Aya Shopia dan Sri Sulasmiyati (2018) | Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> , Ekspor, Dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Studi Pada Produk Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, dan Thailand Periode Tahun 2007-2016) | Variabel : Hutang luar negeri, ekspor, <i>Foreign direct investment</i> . Alat Analisis : Analisis Data <i>Time Series</i> | Temuan studi ini memperlihatkan di variabel FDI serta ekspor berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Variabel utang luar negeri berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Indonesia, dan tak signifikan ke pertumbuhan Thailand |
| 5. | Tafeta Febryani dan Sri Kusreni (2017) | Determinasi Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN | Variabel : Inflasi, pengangguran, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis: Analisis Data Panel | Temuan studi memperlihatkan jika meskipun variabel inflasi tak berdampak signifikan jeputumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN pada tahun 2003–2013, variabel pertumbuhan penduduk dan pengangguran berdampak negatif dan signifikan di negara-negara tersebut pada periode waktu tersebut. |

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu indikator yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai penentu kebijakan pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah serta lembaga dan badan yang terkait dengan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan output di dalam negara. Apabila pendapatan nasional dan output mengalami penurunan atau fluktuatif maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional dan output mengalami peningkatan yang signifikan maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami percepatan. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan namun digunakan demi keuntungan pribadi dan akibatnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi, adanya korupsi dapat menghambat masuknya investasi, menimbulkan distorsi bagi pertumbuhan sektor non formal dan perkembangan perusahaan dan menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik serta memperburuk infrastruktur fisik.

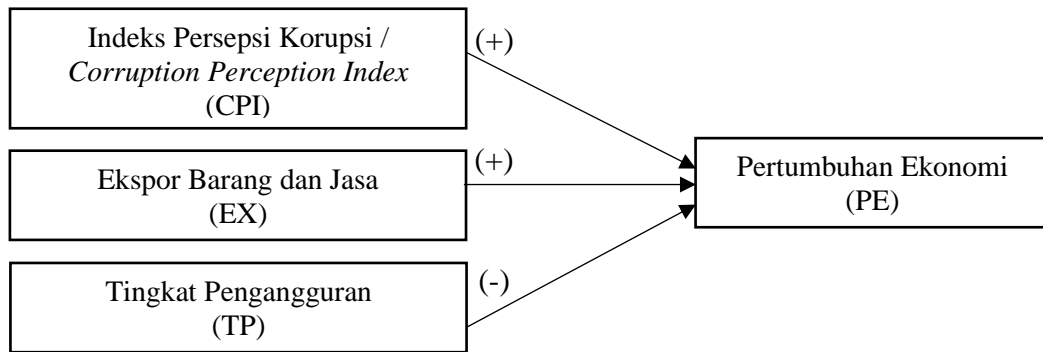
Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan korupsi masih menjadi perdebatan panjang oleh para ekonom, sejarawan, dan ahli politik. Terdapat dua pandangan yang saling bersebrangan mengenai hubungan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi yaitu pandangan "*Grease The Wheel Hypothesis*" dan pandangan "*Sand The Wheel Hypothesis*". Pandangan *grease the wheel hypothesis* adalah pandangan yang meyakini bahwa korupsi merupakan pelicin bagi roda perekonomian atau adanya korupsi memberikan dampak positif bagi perekonomian, sebaliknya pandangan *sand the wheel hypothesis* adalah pandangan yang meyakini bahwa korupsi merupakan pengganggu bagi perekonomian atau adanya korupsi memberikan dampak negatif bagi perekonomian.

Ekspor merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus hingga memperoleh keuntungan. Ekspor juga dapat berarti kegiatan menjual komoditas yang dimiliki oleh suatu negara kepada negara lain, dimana pemerintah mengharapkan adanya pembayaran dalam bentuk valuta asing. Hasil yang diperoleh dari kegiatan perdagangan ekspor adalah sejumlah uang dalam bentuk valuta asing atau disebut juga dengan devisa. Devisa sendiri merupakan sumber pemasukan atau pendapatan suatu negara. Ekspor yang meningkat akan meningkatkan neraca perdagangan suatu negara. Perdagangan ekspor yang lebih besar daripada impor akan menciptakan surplus neraca perdagangan dan

meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi jangka panjang. Sehingga modal asing yang masuk ke dalam negeri akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Fathoni et al., 2017).

Pengangguran merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja namun masih aktif mencari kerja atau menunggu kesempatan kerja kembali. Pengangguran adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi masih mencari atau menunggu pekerjaan. Tingkat pengangguran yang meningkat seringkali dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sebagaimana hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam hukum okun (*okun's law*). Dalam hukum okun dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dan semakin rendah tingkat pengangguran akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi di mana tingkat pengangguran tinggi dan sumber daya yang dimiliki tidak dapat dialokasikan secara efektif, tingkat pendapatan masyarakat menurun dan daya beli masyarakat, atau tingkat keseimbangan daya beli masyarakat, menurun. Sebagai *multiplier effect*, konsumsi masyarakat terhadap output yaitu barang dan jasa akan berkurang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena ketika konsumsi masyarakat menurun maka artinya permintaan atas barang dan jasa juga menurun dan respon produsen atas hal ini adalah dengan menurunkan tingkat produksi barang dan jasanya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis Penelitian

Penulis membuat hipotesis sementara yang didasarkan pada studi empiris dari beberapa peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Diduga indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
2. Diduga ekspor barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
3. Diduga tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.
4. Diduga indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik. Artinya, penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder, artikel, jurnal, studi literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini (Rahman, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggunakan jenis data sekunder. Data panel dalam penelitian ini merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* yaitu menggunakan sembilan negara ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Timor-Leste). Sedangkan data *time series* yaitu periode tahun 2016-2020. Negara Brunei Darussalam dan Lao (PDR) tidak disertakan dalam penelitian ini karena negara tersebut tidak terdaftar di database *Corruption Perception Index (CPI) Transparency International* dan *World Bank*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP growth (annual %), indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran yang masing-masing diperoleh dari *World Bank* dan *Transparency International*. Jumlah keseluruhan populasi adalah 45, didapat dari lima tahun penelitian dikalikan dengan sembilan negara yang diteliti.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw untuk mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB (Prastity & Cahyadi, 2015). Data pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini di

proxy dengan menggunakan variabel *Gross Domestic Product* (GDP) dengan satuan Persen. Data yang digunakan ialah data tahunan dengan periode 2016-2020 yang diperoleh dari *World Bank*.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{GDPT} - \text{GDPT}_{-1}}{\text{GDPT}} \times 100$$

2. Indeks Persepsi Korupsi

Transparency International menggunakan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) dalam menghitung jumlah korupsi yang ada di dalam negara. Indeks persepsi korupsi berfungsi untuk menilai serta memeringkat negara-negara di dunia berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik. Data indeks persepsi korupsi yang digunakan dalam penelitian adalah data tahunan dalam bentuk indeks yang bersumber dari *Transparency International* dari tahun 2016-2020. Hal-hal yang dinilai dalam perhitungan indeks persepsi korupsi adalah penyuapan, pengalihan dana publik, penuntutan kasus korupsi, kerangka hukum yang memadai, akses ke informasi, perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik. Korupsi secara umum melibatkan aktivitas ilegal, yang sengaja disembunyikan dan hanya terungkap melalui skandal, investigasi, atau penuntutan. Penilaian indeks persepsi korupsi yaitu 0-100 poin, dimana semakin besar poin maka suatu negara semakin bersih dari korupsi.

$$\text{Corruption Perception Index (CPI)} = 0-100$$

3. Ekspor Barang dan Jasa

Data ekspor barang dan jasa dalam penelitian ini merupakan data persentasi ekspor barang dan jasa tahunan dari total GDP yang dinyatakan dalam satuan persen. Menurut *world Bank*, ekspor barang dan jasa mewakili nilai dari semua barang dan jasa pasar lainnya yang disediakan ke seluruh dunia. Diantaranya termasuk nilai barang dagangan, pengangkutan, asuransi, transportasi, perjalanan, royalti, biaya lisensi, dan layanan lain seperti komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, bisnis, pribadi, dan layanan pemerintah. Data dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan persen dengan periode tahun 2016-2020 yang diperoleh dari *World Bank*.

4. Tingkat Pengangguran

Menurut *world bank*, tingkat pengangguran mengacu pada bagian angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi tersedia untuk bekerja dan mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk menganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen (Halim, 2012). Data tingkat pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen dengan periode 2016-2020 yang diperoleh dari *World Bank*.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data

| Variabel | Simbol | Satuan | Sumber Data |
|---|--------|--------|-----------------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | PE | Persen | <i>World Bank</i> |
| Indeks Persepsi Korupsi / <i>Corruption Perception Index</i> | CPI | Persen | <i>Transparency International</i> |
| Ekspor Barang dan Jasa | EX | Persen | <i>World Bank</i> |
| Tingkat Pengangguran | TP | Persen | <i>World Bank</i> |

C. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi data panel (*Panel Data Regression Analysis*). Metode regresi data panel merupakan pengembangan dari regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang memiliki kelebihan dari segi jenis data dan tujuan analisisnya. Regresi data panel memiliki jenis data *cross section* dan *time series*. Sifat dari data *cross section* ditunjukkan oleh data yang terdiri lebih dari satu individu (entitas), sedangkan sifat dari data *time series* ditunjukkan oleh lebih dari satu pengamatan waktu (periode). Jika dilihat dari tujuan analisis datanya, data panel berguna untuk melihat dampak ekonomis dari setiap individu selama beberapa periode waktu, dan hal ini tidak dapat diperoleh jika penggunaan data *cross section* atau *time series* dilakukan secara terpisah.

Menurut Wibisono (dalam Basuki & Prawoto, 2017), banyak keunggulan dalam penggunaan regresi data panel, yaitu:

1. Data panel bisa untuk memperkirakan heterogenitas.
2. Kemampuan data panel dalam mengontrol heterogenitas bisa dipakai untuk menguji serta membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel berlaku pada observasi *cross section* yang berulang (*time series*) yang membuatnya tepat dipakai sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Banyaknya penggunaan jumlah observasi yang digunakan dapat berimplikasi pada data yang lebih variatif, informatif dan kolinieritas antara data semakin berkurang, dan *degree of freedom* lebih tinggi sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
6. Penggunaan data panel bisa meminimalisir hasil yang bias yang kemungkinan ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 CPI_{it} + \beta_2 EX_{it} + \beta_3 TP_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

| | |
|-----------|--|
| PE | = Pertumbuhan Ekonomi |
| β_0 | = Intersep |
| CPI | = Indeks Persepsi Korupsi / <i>Corruption Perception Index</i> |
| EX | = Ekspor Barang dan Jasa |
| TP | = Tingkat Pengangguran |
| β_1 | = Koefisien regresi variabel Indeks Persepsi Korupsi |
| β_2 | = Koefisien regresi variabel Ekspor Barang dan Jasa |
| β_3 | = Koefisien regresi variabel Tingkat Pengangguran |
| e | = Variabel gangguan (<i>error terms</i>) |
| i | = Unit <i>cross section</i> sembilan negara ASEAN |
| t | = Unit <i>time series</i> tahun 2016-2020 |

D. Prosedur Analisis Data

1. Metode Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018), untuk mengestimasi model regresi data panel dapat dilakukan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

a. *Common Effect Model (CEM)*

CEM ialah kombinasi dari data *cross section* dan *time series* dalam bentuk *pool* dan dalam estimasinya menggunakan pendekatan *pooled least square* atau pendekatan kuadrat terkecil (Basuki & Prawoto, 2017). Model ini merupakan data yang ditambahkan tanpa mempertimbangkan individu serta waktu yang akhirnya hanya ada satu data yang mana data tersebut tersusun atas variabel terikat dan bebas. Persamaan regresi dalam CEM ditunjukkan pada persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Nilai variabel dependen unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

β_0 = Konstanta (intersep) unit *cross section*

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi (intersep pembeda)

X_{1it} = Variabel independen individu ke-1

X_{2it} = Variabel independen individu ke-2

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

FEM ialah pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi data panel melalui variabel *dummy* guna mengetahui perbedaan intersep tiap individu. Pada model ini masing-masing parameter yang tak diketahui akan diestimasi melalui teknik variabel *dummy*. FEM dikenal juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Teknik LSDV dapat dituliskan dengan persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \beta_5 D_{3i} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Nilai variabel dependen unit *cross section* ke- i untuk periode ke- t

β_0 = Konstanta (intersep) unit *cross section*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ = Koefisien regresi (intersep pembeda)

X_{1it} = Variabel independen individu ke-1

X_{2it} = Variabel independen individu ke-2

D_1, D_2, D_3 = 1 untuk unit individu berpengaruh, 0 untuk unit individu tidak berpengaruh

c. *Random Effect Model* (REM)

REM juga disebut dengan *error component model* (ECM). Jika dalam *fixed effect model* setiap perbedaan antar individu dan deret waktu ditunjukkan melalui intersep, maka berbeda dengan *random effect model* yang perbedaannya ditunjukkan melalui *error* (Munandar, 2017). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residualnya diduga mempunyai hubungan waktu antar subjek. REM dipakai mengatasi kelemahan dari FEM yang memakai variabel *dummy*. Dalam mengestimasi model REM syarat yang wajib dipenuhi ialah jumlah *cross section* lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Model ini sangatlah membantu bagi perseorangan yang diambil sebagai sampel ialah dipilih dengan acak atau random dan menjadi wakil dari populasi.

2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018), guna mengetahui apakah model data panel bisa diregresikan melalui CEM, FEM, dan REM maka dijalankan uji sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji chow ialah pengujian yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM dalam mengestimasi regresi data panel (Nandita et al., 2019).

Hipotesis pada uji ini dapat ditulis dengan:

H_0 : Model *Common Effect* (CEM) lebih baik

H_a : Model *Fixed Effect* (FEM) lebih baik

Keputusan yang dapat diajukan ialah bila hasil $\text{prob.} > F$ lebih kecil dari nilai α (5%) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya *fixed effect model* lebih baik dibandingkan dengan *common effect model*. Begitupun sebaliknya, bila hasil $\text{prob.} > F$ lebih besar dari α (5%), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian untuk menetapkan model paling baik antara FEM dan REM dalam mengestimasi regresi data panel (Nandita et al., 2019). Hipotesis dalam uji hausman dapat ditulis sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect* lebih baik

H_a : Model *Fixed Effect* lebih baik

Keputusan yang dapat diajukan berdasarkan hipotesis diatas ialah apabila hasil $\text{prob. Chi-square} > 0,05$ maka H_0 diterima dan menggunakan model *random effect*. Begitu juga sebaliknya, jika $\text{prob. Chi-square} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menggunakan FEM.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah pengujian yang dipakai untuk menetapkan model terbaik antara REM dan CEM dalam mengestimasi regresi data panel.

Hipotesis dalam uji hausman dapat ditulis sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect* lebih baik

H_a : Model *Random Effect* lebih baik

Keputusan yang dapat diajukan berdasarkan hipotesis di atas adalah, H_0 ditolak bila nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares*. Artinya, estimasi terbaik yang digunakan dalam model regresi data panel adalah metode *random effect*. Sebaliknya, H_0 diterima apabila nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik *chi-squares*. Artinya, estimasi terbaik yang digunakan dalam model regresi data panel adalah metode *common effect* dibandingkan metode *random effect*.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan hasil estimasi yang bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau persamaan regresi linear yang tidak bias maka hasil estimasi perlu memenuhi beberapa asumsi yang saling berkaitan. Apabila salah satu uji asumsi tidak sesuai dengan ketentuannya, maka persamaan regresi yang dihasilkan tidak memiliki sifat BLUE. Apabila pengujian asumsi klasik yang dihasilkan tidak memiliki sifat BLUE maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hipotesis Uji T dan Uji F. Terdapat uji yang perlu dilakukan demi memperoleh hasil estimasi yang bersifat BLUE, yaitu:

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual dipakai guna mengetahui apakah terdapat nilai residual yang berdistribusi dengan normal atau tidak. Menurut Widarjono (2018), uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan melalui uji t akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini akan melakukan uji normalitas dengan melakukan uji Jarque-Bera (J-B). Hipotesisi uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut:

H_0 : Residu tersebar secara normal

H_a : residu tidak tersebar secara normal

Kriteria pengujian dari hipotesis di atas adalah:

Jika $P_{\text{value}} < P_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $P_{\text{value}} > P_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam

model regresi diantaranya terdapat metode informal, park, white, breusch-pagan, goldfield-quandt, korelasi spearmin serta metode glejser (Widarjono, 2018). Pada studi ini metode yang akan dipakai adalah metode Glejser. Asumsi yang akan digunakan dalam penentuan heteroskedastisitas adalah:

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : terdapat heteroskedastisitas

Kriteria pengujian dari hipotesis di atas adalah:

$Obs * R\text{-square} < Obs * R\text{-square tabel}$, tidak ada heteroskedastisitas

$Obs * R\text{-square} > Obs * R\text{-square tabel}$, terdapat heteroskedastisitas

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Widarjono (2018), multikolinearitas merupakan hubungan linear antara variabel independen dalam regresi berganda di dalam persamaan. Tanda terjadinya masalah multikolinearitas adalah ketika suatu model memiliki *standard error* yang besar dan nilai statistik *t* yang rendah, selain itu ketika suatu model memiliki koefisien determinasi yang tinggi (R^2) namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen melalui uji *t*. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan pengujian *pearson correlation*. Nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinearitas adalah 80 persen (0,8).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapat korelasi antara satu anggota observasi dengan observasi lain dengan waktu yang berbeda (Widarjono, 2018). Autokorelasi juga diartikan sebagai korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, peneliti menggunakan metode Durbin-Watson (DW). Berikut adalah hipotesis dari uji autokorelasi metode Durbin-Watson:

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_a : Terdapat autokorelasi

Putusan yang dihasilkan dari nilai uji Durbin Watson adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018):

Tabel 3. Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

| Nilai Statistik d | Hasil |
|-------------------------|--|
| $0 < d < d_L$ | Ada autokorelasi positif |
| $d_L < d < d_U$ | Tidak ada keputusan |
| $d_U < d < 4 - d_U$ | Tidak ada autokorelasi positif / negatif |
| $4 - d_U < d < 4 - d_L$ | Tidak ada keputusan |
| $4 - d_L < d < 4$ | Ada autokorelasi negatif |

4. Pengujian Hipotesis Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara pengujian satu arah yaitu dengan hipotesis:

1) Indeks Persepsi Korupsi

$H_0: \beta_1 = 0$, variabel CPI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di 9 negara asean.

$H_a: \beta_1 > 0$, variabel CPI berpengaruh positif signifikan ke pertumbuhan perekonomian di 9 negara asean.

2) Ekspor Barang dan Jasa

$H_0: B_2 = 0$, variabel ekspor barang dan jasa tak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara asean.

$H_a: B_2 > 0$, variabel ekspor barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara asean.

3) Tingkat Pengangguran

$H_0: B_3 = 0$, variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara asean.

$H_a: B_3 > 0$, variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara asean.

4) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%).

Berdasarkan hipotesis diatas, terdapat kriteria pengujian untuk membandingkan nilai t-statistik dan t-tabel untuk menerima atau menolak H_0 :

- a. Jika nilai t-statistik < nilai t-tabel dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya secara statistik variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
- b. Jika nilai t-statistik > t-tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya secara statistik variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Simultan (Uji f)

Uji ini dipakai untuk melakukan pengujian pengaruh dari seluruh variabel bebas secara simultan ke variabel kontrol yakni pengaruh dari semua variabel bebas. Menurut Syahputra (2017), pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara pengujian satu arah yaitu dengan hipotesis:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, secara bersama-sama seluruh variabel bebas tidak berdampak signifikan ke variabel terikat.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berdampak signifikan ke variabel terikat.

Taraf signifikan yang dipakai ialah 0.05 (5%).

Berdasarkan hipotesis diatas, terdapat kriteria untuk pengujian F-statistik:

- a. Jika nilai F-statistik < nilai F-tabel maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai F-statistik > nilai F-tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel dependen (terikat) dapat dijelaskan oleh variabel independen (bebas). Besarnya koefisien determinasi yaitu 0 – 1. Artinya, pengaruh dari semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat semakin kecil jika mendekati nol, sedangkan jika koefisien determinasinya semakin mendekati 1 maka model tersebut menunjukkan semakin kuatnya variasi variabel bebas terhadap variabel terikat (Syahputra, 2017).

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN tahun 2016-2020. Hasil tidak signifikan dari variabel CPI dipengaruhi oleh adanya perbedaan dari masing-masing negara yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan korupsi. Selain itu juga disebabkan oleh adanya perbedaan skor yang jauh antar negara penelitian seperti Singapura dengan negara lainnya.
2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ekspor barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN tahun 2016-2020. Artinya, jika terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekspor maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN pada tahun 2016-2020. Artinya, jika terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran maka pertumbuhan ekonomi akan menurun begitu juga sebaliknya.
4. Hasil estimasi menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi, ekspor barang dan jasa, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara ASEAN.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan korupsi, Thailand perlu meninjau kembali struktur dan peran NACC serta memperkuat independensinya. Hal ini dapat mencakup pemilihan anggota NACC yang lebih transparan dan peningkatan akuntabilitas lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus korupsi. Memperkuat badan pengawasan independen dan audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Melibatkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, mengenai dampak buruk korupsi. Membangun sistem pelaporan korupsi yang aman dan bersifat rahasia bagi para pelapor korupsi. Hal ini akan membantu masyarakat untuk mengancam korupsi tanpa adanya rasa takut.

Berkaitan dengan ekspor, pemerintah perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mencari peluang di pasar baru atau berkembang serta memantau dampak gejolak ekonomi dan keuangan global, sehingga Thailand tidak terlalu bergantung pada satu pasar. Hal ini akan memperluas kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain dan menjalankan kampanye promosi ekspor yang agresif. Diversifikasi produk ekspor Thailand agar tidak terlalu bergantung pada sektor petrokimia dan pertanian. Fokus pada produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan permintaan global yang stabil. Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam produksi dan transportasi untuk mengurangi ketergantungan pada harga minyak dunia. Membuat strategi yang dapat mengantisipasi perubahan dalam perdagangan global, terutama dalam konteks ketegangan perdagangan.

Berkaitan dengan pengangguran, pemerintah Thailand perlu memantau pengangguran dengan lebih akurat dengan mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pekerjaan yang tidak stabil, dan orang-orang yang mencari pekerjaan secara aktif. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi

sektor pertanian melalui pendekatan berbasis teknologi, pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur pertanian. Mendorong diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja di sektor terkait seperti agroindustri, pariwisata pedesaan atau industri lokal. Thailand perlu mengembangkan semangat kewirausahaan dengan memanfaatkan platform ekonomi dan bisnis online sehingga mayoritas masyarakat Thailand yang bekerja di sektor pertanian dapat beralih ke aktivitas ekonomi lainnya.

2. Berkaitan dengan korupsi, Malaysia perlu memperkuat lembaga antikorupsi yang sudah ada dibandingkan terus menerus mendirikan lembaga antikorupsi baru namun tetap tidak efisien dalam pelaksanaannya. Malaysia perlu mengatasi praktik politik uang yang menyebabkan pilih kasih, kronisme, penyuapan, penggelapan, dan penipuan dengan memperkuat undang-undang terkait korupsi dan pengimplementasiannya. Praktik-praktik tersebut terus terjadi dan masyarakat Malaysia menganggap wajar hal ini. Maka, dari masyarakat sendiri perlu memberikan sanksi sosial yang berat bagi pelaku-pelaku korupsi yaitu dengan tidak menyambut koruptor yang telah bebas dan tidak memilih para koruptor menduduki jabatan publik, sehingga nantinya akan menambah efek jera bagi si pelaku.

Berkaitan dengan ekspor, produk-produk utama penyebab penurunan seperti produk listrik dan elektronik perlu ditingkatkan lagi dalam hal produksi sehingga akan meningkatkan jumlah barang ekspor. Malaysia juga dapat menerapkan pengecualian bea masuk atas bahan baku dan komponen yang digunakan dalam produksi barang yang dimaksud untuk ekspor. Pengecualian tersebut dapat berlaku untuk mesin dan peralatan yang digunakan langsung dalam proses manufaktur, namun tidak tersedia di perekonomian domestik. Selain pengecualian yang ada, pemerintah Malaysia harus mempertimbangkan penerapan pembebasan dan konsesi bea masuk yang ditargetkan untuk input dan barang modal yang berkualitas lebih tinggi sehingga dapat membantu perusahaan-perusahaan Malaysia memperoleh manfaat dari limpahan teknologi internasional dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Berkaitan dengan pengangguran, para pembuat kebijakan harus memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing internasional, seperti mereformasi sistem pendidikan untuk menghasilkan pekerja terampil dan mengurangi ketergantungan pada pekerja asing berketerampilan rendah sehingga dapat menekan pengangguran.

3. Berkaitan dengan korupsi, Timor-Leste perlu pendanaan yang lebih baik yang hanya dapat ditingkatkan jika kepemimpinan politik memiliki komitmen untuk mengurangi korupsi. Timor-Leste perlu menyeimbangkan pekerjaan mereka dengan fokus pada kegiatan pencegahan dan penindakan. Timor-Leste tidak memiliki sistem penilaian integritas, maka perlu menerapkan sistem integritas. Terdapat disparitas dan perbedaan gaji antara staf lembaga antikorupsi dan ini tidak baik untuk moral, sehingga struktur gaji antara staf lembaga antikorupsi lebih baik seragam, dan Timor-Leste perlu memberlakukan undang-undang anti korupsi untuk memperkuat kerja lembaga tersebut.

Berkaitan dengan ekspor, Timor-Leste perlu meningkatkan kualitas kopi dan secara alami akan menarik lebih banyak pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai kopi tersebut. Produksi minyak lepas pantai yang terus menurun sehingga pemerintah perlu memulai peralihan sektor perekonomian di luar minyak dan gas. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian dalam negeri, mendorong dan mengembangkan industri skala kecil, serta meningkatkan dan memajukan industri pariwisata.

Berkaitan dengan pengangguran, Timor-Leste perlu penciptaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan kerja bagi sejumlah besar generasi muda yang memasuki pasar tenaga kerja pada tahun-tahun mendatang, meningkatkan lapangan kerja formal dan mengatasi produktivitas saat ini. Timor-Leste juga perlu meningkatkan penetrasi internet untuk memudahkan akses informasi termasuk informasi mengenai lapangan pekerjaan, serta perlu adanya program pelatihan bagi generasi muda sehingga skill yang dimiliki dapat memadai atau sesuai dengan permintaan pasar.

4. Berkaitan dengan kasus korupsi di Indonesia, dalam penanganannya lembaga yang menangani korupsi harus selalu kompak dan tidak sektoral, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum juga menjadi prioritas. Lembaga penanganan korupsi di Indonesia juga perlu memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Meskipun tidak menjamin korupsi berkurang, perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi. Selain itu, pengimplementasian tindak pidana korupsi yang seringkali tumpang tindih dengan hukum yang berlaku (seperti penjara atau denda yang dijatuhkan lebih ringan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku) hal-hal seperti ini perlu diperhatikan dan diperbaiki.

Berkaitan dengan ekspor, Indonesia saat ini bersifat memenuhi pesanan atau menunggu pembeli datang. Strategi ekspor Indonesia masih bersifat bukan menyerang atau *struggle* ke negara lain yang menyebabkan produk Indonesia belum menuju produk yang berdaya saing. Metode ekspor perlu dirubah menjadi menyerang (*struggle*) ke negara tujuan ekspor. Maka dari itu, para pelaku usaha harus mengembangkan produk yang lebih memiliki daya saing seperti meningkatkan nilai ekspor tidak hanya produksi barang pertanian dan perkebunan saja melainkan dengan diversifikasi untuk komoditas industry. Dari sisi pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan demi mendukung peningkatan ekspor diantaranya yaitu menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal dengan cara penurunan tarif, memberikan kemudahan dalam pengurusan lisensi dan perizinan ekspor, serta meningkatkan transparansi peraturan ekspor. Kebijakan selanjutnya yaitu memperluas pasar ekspor dengan cara menjaga jumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional dan multilateral, dan penajakan pasar-pasar nontradisional.

Berkaitan dengan pengangguran, pemerintah perlu bekerjasama dengan perusahaan, lembaga pelatihan atau pendidikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu Pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Pemerintah perlu meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi penduduk Indonesia, mengingat tidak semua orang senang dan berbakat melakukan pekerjaan kantor. Maka dari itu, pemerintah perlu memfasilitasi penduduk yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga kelompok tersebut dapat memperoleh lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang akurat mengenai lapangan pekerjaan di berbagai media yang disertai dengan transparansi.

5. Berkaitan dengan korupsi, Myanmar perlu memberikan otonomi operasional terhadap lembaga antikorupsi yang ada untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi tanpa campur tangan apa pun termasuk politik. Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, pejabat publik tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang atau organisasi yang tidak berhak mendapatkannya, termasuk teman, keluarga, dan orang-orang yang mungkin menawarkan atau membayar suap sebagai imbalan atas bantuan, pinjaman, atau lainnya. Myanmar harus menunjukkan kemauan politiknya untuk memberantas korupsi dengan menyediakan anggaran dan SDM yang diperlukan.

Berkaitan dengan ekspor, Myanmar dapat lebih mengandalkan sektor pertanian dan manufaktur sehingga fokus ekspor tidak hanya pada garmen saja. Myanmar juga perlu fokus pada pengurangan defisit perdagangan, promosi ekspor, substitusi impor, dan diversifikasi pasar.

Berkaitan dengan pengangguran, Myanmar perlu menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak serta peluang kewirausahaan yang berkelanjutan bagi semua orang, termasuk bagi kelompok rentan dampak konflik dan bencana.

Memperkuat penerapan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja melalui perbaikan tata kelola pasar tenaga kerja.

6. Berkaitan dengan korupsi, Kamboja perlu membangun kapasitas hukum, kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan pencucian uang melalui kerja sama dengan mitra nasional dan internasional. Meningkatkan integritas dan kapasitas dalam pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga negara termasuk sektor swasta dan publik, serta monitoring dan evaluasi lembaga korupsi terhadap implementasi rencana strategi sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum dengan praktik. Memperkuat kejaksaan dan aparat penegak hukum agar keduanya tidak terpolitisasi oleh suap dan pengaruh luar.

Berkaitan dengan ekspor, Kamboja yang didominasi oleh garmen, alas kaki, dan barang perjalanan, perlu mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungannya. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri lain yang memiliki potensi untuk tumbuh, seperti industri elektronik, makanan atau pertanian. Mendorong peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar internasional dan meningkatkan daya saing. Mendukung promosi ekspor dengan memberikan dukungan finansial kepada perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional dan misi dagang. Memperbaiki infrastruktur dan sistem logistik, seperti jaringan transportasi dan pelabuhan.

Berkaitan dengan pengangguran, kamboja perlu menyediakan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan peluang lapangan kerja di sektor manufaktur dan jasa dengan menyediakan berbagai insentif. Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan kerja dalam bidang pertanian dengan membantu petani dalam membuat lahan pertanian lebih produktif. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan dan mengurangi ketimpangan antara petani dan kota. Pemerintah dapat melibatkan lebih banyak perempuan dalam

sektor garmen dengan memberikan pelatihan keterampilan dan meningkatkan kondisi kerja dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan.

7. Berkaitan dengan korupsi, Vietnam perlu membentuk lembaga antikorupsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari yurisdiksi Perdana Menteri dan *Vietnam's Communist Party* (VCP) agar lembaga antikorupsi yang sudah ada tidak mudah untuk diinternalisasikan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan korupsi kecil-kecilan di sektor publik karena perlindungan yang minim, artinya Vietnam perlu memberikan dan memperkuat jaminan perlindungan bagi pelapor korupsi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberantas korupsi.

Berkaitan dengan ekspor, Vietnam perlu mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada garmen dan alas kaki. Pemerintah dapat memberikan insentif pada industri lain seperti teknologi informasi, produk pertanian, atau peralatan medis. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial pada perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan dapat memenuhi kebutuhan pasar global. Memberikan informasi pasar yang lebih baik kepada produsen Vietnam mengenai permintaan pasar global, tren konsumen, dan persyaratan kegiatan perdagangan internasional.

Dalam hal pengangguran, Vietnam didominasi oleh pengangguran terutama kaum muda. Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau dan memperbarui program pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Mendorong kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan dengan perusahaan, misalnya menawarkan magang atau kunjungan industri. Memberikan informasi yang lebih akurat mengenai pilihan karir kepada siswa dan mahasiswa, serta melibatkan penasihat karir yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan karir yang tepat. Meningkatkan peran dan efektivitas pusat penempatan kerja untuk menghubungkan lulusan dengan peluang kerja

yang sesuai. Di sini pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama secara aktif dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut.

8. Berkaitan dengan korupsi, Filipina perlu meningkatkan sanksi terhadap korupsi. Melakukan advokasi untuk penerapan secara tegas ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Peraturan Pemerintah, khususnya di bidang konsultasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut harus memberikan hukuman bagi setiap pejabat publik yang menggunakan dana pembangunannya tanpa konsultasi terlebih dahulu. Filipina perlu mengurangi peluang korupsi melalui reformasi kebijakan dan deregulasi, meningkatkan pengawasan masyarakat, reformasi proses anggaran, meningkatkan pengawasan terhadap departemen dan lembaga terpilih serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang korupsi, sehingga kasus korupsi keluarga kerajaan tidak terulang kembali dimasa depan. Kegiatan memberi hadiah di Filipina dianggap wajar. Artinya, kebiasaan memberi hadiah untuk hal-hal yang tidak semestinya perlu dihilangkan.

Terkait ekspor, Filipina perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan bahan kimia dan komponen besi yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi standar internasional dan meningkatkan pangsa pasar. Mendorong diversifikasi produk pada sektor komponen kimia dan besi dengan fokus pada produk yang pangsa pasarnya lebih besar dan stabil. Hal ini dapat mencakup peningkatan kualitas produk, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam desain dan teknologi.

Terkait pengangguran, pemerintah Filipina dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja yang terkena dampak. Program pelatihan yang ditawarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan masa depan. Mendukung proyek pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja lokal. Mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya penciptaan

lapangan kerja melalui magang, program pelatihan atau kemitraan dengan pemerintah.

9. Singapura telah berhasil mencapai tingkat korupsi yang rendah dengan CPI yang tinggi, namun penting untuk terus mempertahankan dan meningkatkan langkah-langkah anti korupsi dan memperkuat integritas sistem politik pemerintahan. Tindakan yang perlu dilakukan adalah untuk terus melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan badan yang mungkin rentan terhadap korupsi. Terus memperkuat peran dan kapasitas badan anti-korupsi CPIB untuk melanjutkan pekerjaan penyelidikan dan penuntutan. Memastikan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai publik memiliki pemahaman yang kuat mengenai etika dan integritas, serta memberikan pelatihan secara berkala mengenai pencegahan korupsi.

Singapura memiliki perekonomian yang sangat terbuka dan tingkat ekspor yang tinggi dan stabil. Untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas tersebut dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus terus mencari peluang di pasar ekspor baru atau berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang sudah mapan. Terus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk ekspor untuk mempertahankan pangsa pasar dan mengatasi masalah lingkungan global. Memantau risiko perekonomian global secara berkala untuk mengantisipasi potensi ketidakpastian perekonomian.

Terkait pengangguran, Singapura dapat terus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga pekerja dapat meningkatkan kualifikasinya dan mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Memastikan kebijakan jaminan sosial yang adil dan menyediakan jaringan perlindungan sosial bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mendorong perusahaan untuk memahami pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan, yang dapat membantu mempertahankan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (n.d.). *Makroekonomi* (A. Maulana (ed.); 2019th ed.). Penerbit Erlangga.
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34.
- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 37–44. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.85>
- Agma, S. F. (2015). Peranan Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–14.
- Aida, N., Ciptawaty, U., Gunarto, T., & Aini, S. (2021). Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 159–167. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.301>
- Aidt, T. S. (2009). Corruption, institutions, and economic development. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(2), 271–291. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grp012>
- Akman, B., & Sapha A.H, D. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(4), 531–538.
- Alisman. (2016). Pengaruh Investasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal E-KOMBIS*, 2(1), 79–91.
- Apridar. (2018). *Ekonomi Internasional Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam Aplikasinya edisi 2* (2nd ed.). expert.
- Aprilia, S., & Islahuddin. (2019). Persepsi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 279–285.
- ASEAN. (2022). *ASEAN Leaders' Statement On The Application Of Timor-Leste For Asean Membership*. 1. <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/05-ASEAN-Leaders-Statement-on-the-Application-of-Timor-Leste-for->

ASEAN-Membership.pdf

- Asian Development Bank. (2020). *Cambodia's Economic Growth to Slow in 2020, Rebound Expected in 2021 — ADB*. <https://www.adb.org/news/cambodias-economic-growth-slow-2020-rebound-expected-2021-adb>
- Asian Development Bank. (2022). *Philippine Economy to Decline Further in 2020 Amid COVID-19, With Recovery in 2021*. <https://www.adb.org/news/philippine-economy-decline-further-2020-amid-covid-19-recovery-2021>
- Ayu, I. N., & Husaini, M. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Pada Sepuluh Kabupaten/Kota Di Propinsi Lampung 2006-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–15.
- Aziz, A. R. (2020). Pengangguran dalam kalangan Tenaga Kerja Semasa Wabak COVID-19. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(11), 1–9. <https://www.msocsciences.com/index.php/mjssh/article/view/539>
- Bangun, B. H. (2019). Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan. *Jurnal HAM*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>
- Bank Indonesia. (2019). *Konflik Perdagangan Makin Menekan Perekonomian Global Edisi III 2019*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3.Ringkasan-Eksekutif.3.19.pdf>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In *PT Rajagrafindo Persada*.
- Bosso, F. (2015). Timor-Leste : Overview of Corruption and Anti- Corruption. *Transparancy International, February*.
- BPS. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesi Agustus 2022*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan* (H. W. Hardani (ed.)). Penerbit Erlangga.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). Labor Markets During the COVID-19 Crisis: A Preliminary View. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3574736>
- CSIS. (2022). *Squeezed From Two Sides: Myanmar Garment Workers Caught Between Covid and the Coup*. Center For Strategic & International Studies.

https://www-csis-org.translate.google.com/blogs/new-perspectives-asia/squeezed-two-sides-myanmar-garment-workers-caught-between-covid-and?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 71–81.
- Dennis, C. (2020). *Highlights of the April 2020 Labor Force Survey*. Philippine Statistic Authority. <https://psa.gov.ph/content/employment-situation-april-2020>
- Department of Statistics Malaysia. (2020). *Malaysia External Trade Statistics March 2020*. Department of Statistics Malaysia. <https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/malaysia-external-trade-statistics-march-2020>
- Deprianto, Asriza, & Jolianis. (2011). Pengaruh Konsumsi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padang. *Pengaruh Konsumsi Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di*, 1–17.
- Development Asia. (2021). *Managing the COVID-19 Outbreak in Timor-Leste*. https://development.asia/policy-brief/managing-covid-19-outbreak-timor-leste#_ftnref4
- Djalante, R., Nurhidayah, L., Minh, H. Van, Phuong, N. T. N., Mahendradhata, Y., Trias, A., Lassa, J., & Miller, M. A. (2020). COVID-19 and ASEAN Responses: Comparative Policy Analysis. *Progress in Disaster Science, January*.
- Duong, Y. (2015). Corruption in Vietnam : Causes and Culprits. *Cultural Relations Quarterly Review*, 20–29.
- Durairaja, S., Saat, G. A. M., Kamaluddin, M. R., Munesveran, N., Azmi, A. H., & Jia, L. L. (2019). Corruption in Malaysia: A Review. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(24), 1–12. <https://doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i24/143798>
- Fathoni, R. achmad R., Musadieq, M. Al, & Supriono. (2017). Pengaruh Ekspor Intra-Asean Dan Fdi Intra-Asean Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN (Studi pada Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand Tahun 2006-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 45(1), 47–54.
- Febryani, T., & Kusreni, S. (2017). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5501>
- Feijó, R. G. (2020). *Timor-Leste's COVID-19 Success and Sweeping Political Change*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2020/12/24/timor->

lestes-covid-19-success-and-sweeping-political-change/

- Franita, R., & Fuady, A. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Gita, R. A. (2022). *No Further Need for PACC's Retention: Palace*. The Philippine News Agency (PNA). <https://www.pna.gov.ph/articles/1178553>
- Halim, M. A. (2012). *Teori Ekonomika* (Edisi Pert). Jelajah Nusa.
- Hamid, E. S. (1999). Peran dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian. *Economics Journal of Emerging Markets*, 4, 41–58.
- Hanafe, N., & Abdullah, B. (2022). *Faktor-Faktor Peningkatan Kadar Pengangguran Di Malaysia Ketika Pandemi Covid-19*. 1–13.
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3), 265–279. <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>
- Haryati, S. N., & Hidayat, P. (2015). Analisis Kausalitas Antara Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Asean Plus Three. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Hasoloan, J. (2013). Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 102–112. <https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Hussin, F., & Saidin, N. (2012). Economic Growth in ASEAN-4 Countries: A Panel Data Analysis. *International Journal of Economics and Finance*, 4(9). <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n9p119>
- Ichavani, lutfiana fiqry, & Sasana, H. (2019). Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 61–72.
- Ikhwan, M. (2022). Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 17–24.
- Indriati, E. (2014). *Pola dan akar korupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- International Labour Organisation. (2019). *Report on the Cambodia Labour force Survey 2019*.

- International TIN Association. (2022). *Myanmar exports drop on major port closure*. <https://www.internationaltin.org/myanmar-exports-drop-on-major-port-closure/>
- Iswanto, D. A. (2013). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran: Validitas Hukum Okun di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 1–12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/526>
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS* (A. Ika (ed.)). Semarang University Press.
- Jhingan, M. I. (1975). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 6(1), 16–27. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/335>
- Kurniawan, B., Sunarya, S. R., Naofal, F., & Sudarjah, G. M. (2021). Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dan Korea. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(3), 120–130.
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71–83. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/12554%0Ahttps://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/12554/11370>
- Larasati, I. S., & Sulasmiyati, S. (2018). Pengaruh inflasi, ekspor dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 63(1), 8–16. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2694>
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global*. Mitra Wacana Media.
- LDKPI. (2023). *Republik Demokratik Timor Leste*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/profile-rdtl>
- Lee, C. (2022). Uncertainties in Malaysia's Economic Recovery. *ISEAS Yusof Ishak Institute Research*, 2(53), 2022.
- Leff, N. H. (1964). Economic Development Through Bureaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8–14. <https://doi.org/10.1177/000276426400800303>

- Lestari, Y. S. (2017). Korupsi: Suatu Kajian Analisis Di Negara Maju Dan Negara Berkembang. *Jurnal Community*, 3(2), 180–195. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i2.129>
- Lipsey, R. G., Courant, P. N., Purvis, D. D., & Steiner, P. O. (1997). *Pengantar Makroekonomi, Jilid 2* (Edisi Kese). Binarupa Aksara.
- Lui, F. T. (1985). *An equilibrium queuing model of bribery*. 760–781.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482>
- Lynn, K. S. (2020). *Myanmar's Economy Severely Impacted by COVID-19: Report*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/myanmars-economy-severely-impacted-by-covid-19-report>
- Mangkosoebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik (Edisi Ketiga)*. BPFE.
- MATRADE. (2020). *Trade Performance for Year 2020 and December 2020*. Malaysia External Trade Development Corporation. <https://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/press-releases/5358-trade-performance-for-year-2020-and-december-2020#:~:text=Malaysia's exports,of the COVID-19 pandemic>.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, August.
- MIDA. (2020). *US-China trade war does not have major impact on Malaysia's trade — MITI*. Malaysian Investment Development Authority. <https://www.mida.gov.my/mida-news/us-china-trade-war-does-not-have-major-impact-on-malysias-trade-miti/#:~:text=The US-China trade war,increase of 3.1%25 to RM80>.
- Mo, P. H. (2001). Corruption and Economic Growth. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 66–79. <https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703>
- Monetary Policy Report. (2019). *Implications of low unemployment rate in Thailand*. March, 2018–2020.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126–155.
- Munandar, A. (2017). Analisis Regresi Data Panel pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 59–67.
- Munawaroh, N. (2021). Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi

- Di Asia Pasifik. *Lex Renaissance*, 6(3), 505–519.
<https://www.transparency.org/cpi2018>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan EKonomi di Negara-negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21, 73–82.
- Nurhakim, K., & Satar, M. (2015). Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang. *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan*, 5(2), 16–21.
<http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/view/155/126>
- Open Development. (2021). *Exports*.
[https://opendevelopmentcambodia.net/topics/exports/#:~:text=Total export value reached %2417,the U.S. economy in 2021.](https://opendevelopmentcambodia.net/topics/exports/#:~:text=Total%20export%20value%20reached%2017,the%20U.S.%20economy%20in%202021)
- Oudom, I. (2018). *Best Practices in Anti-Corruption in The Kingdom Of Cambodia*. April 2010, 110–119.
- Parrocha, A. (2022). *Marcos' 1st edict Abolishes PACC, Office of CabSec*. The Philippine News Agency (PNA). <https://www.pna.gov.ph/articles/1178410>
- PHI - JSK. (2020). *Pemerintah Antisipasi Penambahan Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. <https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-antisipasi-penambahan-pengangguran-di-masa-pandemi-covid-19>
- Phuong, N. T. (2017). Corruption in Vietnam: The Current Situation and Proposed Solutions. In *The Changing Face of Corruption in the Asia Pacific*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00014-9>
- Pico, N. (2020). Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(3), 500–507. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i3.12760>
- Prastiti, H. S. (2022). Membedah Parameter Berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 439–456.
- Prastity, N., & Cahyadi, M. (2015). The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Organization of Islamic Conference (OIC) member countries in 2000-2013. *Kajian*, 20(3), 255–270. www.sesrtcic.org,
- Pratiwi, Y. R. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi*

Akibat Pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

- Prayogi, A. (2023). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Ekspor Negara ASEAN Saat Terjadi Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(2), 332–345.
- Primandari, N. R. (2017). Pengaruh Nilai Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2000-2015. *Kolegial*, 5(2), 183–194.
- Putra, G. N. A., & Sutrisna, I. K. (2017). Pengaruh Produksi Dan Inflasi Terhadap Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(11), 2165–2194.
- Putri, D. F. (2023). Implikasi Etika Bisnis Dalam Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.457>
- Rahman, T. (2015). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Asean. *Media Ekonomi*, 23(3), 199–212. <https://doi.org/10.25105/me.v23i3.3522>
- Rahmiati, Saputra, T., Nurhafni, & Sobin, M. (2021). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura dan Hongkong. *Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Humaniora*, 1(1), 271. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.271-303>
- Razak, M. Y. bin A. (2020). *Key Statistics of Labour Force in Malaysia, April 2020*. Department of Statistics Malaysia. <https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/key-statistics-of-labour-force-in-malaysia-april-2020>
- Risa, M. (2018). *Ekspor dan Impor*. Poliban Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=DY2IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+ekspor&ots=MsbMAjNofY&sig=CMHQfbuwUIm8ttvLKv8_6LbxCGY&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian ekspor&f=false
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6(3), 9–16. <https://doi.org/10.56076/jkexp.v6i3.2165>
- Royal Thai Embassy. (2023). *Thailand in brief*. <https://thaiembdc.org/about-thailand/thailand-in-brief/>
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid 1* (Y. Sumiharti (ed.); Kelima). Erlangga.

- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Makroekonomi* (M. Sumaryati (ed.); Edisi 17). PT Media Global Edukasi.
- Sari, A. C. P., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Asean Member Countries Pada Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 24–29. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.26>
- Sari, F. A., Rochaida, E., & Suharto, R. B. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(4).
- Schoeberlein, J. (2020). Corruption in ASEAN Regional trends from the 2020 Global Corruption Barometer and Country Spotlights. *Transparency International*.
- Sedyaningrum, M., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 34(1), 114–121.
- Septiatin, A., Mawardi, & Rizki, M. A. K. (2016). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *I-Economic*, 2(1).
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran"*, Jakarta, 249–262.
- Seto, T. A. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 1(1), 1–12.
- Shah, A. U. M., Safri, S. N. A., Thevadas, R., Noordin, N. K., Rahman, A. A., Sekawi, Z., Ideris, A., & Sultan, M. T. H. (2020). COVID-19 Outbreak in Malaysia: Actions Taken by The Malaysian Government. *International Journal of Infectious Diseases*, January, 108–116. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/translate.google/pmc/articles/PMC7264933/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Shihab, R. A., Soufan, T., & Abdul-khaliq, S. (2014). The Causal Relationship between Exports and Economic Growth in Jordan. *Global Journal of Management and Business Research*, 14(3).
- Shopia, & Sulasmiyati. (2018). Pengaruh Foreign Direct Invesment, Ekspor, dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Studi pada Produk Domestik Bruto Indonesia, Malaysia, dan Thailand Periode Tahun 2007 - 2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(3), 20–28.
- Sitorus, D. S. (2021). Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok: Bagaimana

Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia Tahun 2017 - 2020? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1), 187.
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v13i1.34192>

Sothimon Nuon. (2010). *Preventing Corruption: Effective Administrative and Criminal Justice Measures*. 122–129.

Sugianto, & Pemadhy, Y. T. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(3), 54–63.
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/583>

Suyatmiko, W. H. (2020). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

Swaleheen, M. U., & Stansel, D. (2007). Economic Freedom, Corruption, and Growth. *Cato Journal*, 27(3), 343–358.

Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2).
<https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/334%0Ahttps://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/download/334/259>

Thang, N. C., & An, P. S. (2021). Vietnam ' s Economy in the Wake of Covid-19. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 41, 1–9.

The United Nations Development Programme (UNDP) Timor-Leste. (2023). *Support to Anti-Corruption Initiatives in Timor-Leste*.
<https://www.undp.org/timor-leste/projects/support-anti-corruption-initiatives-timor-leste>

Transparency International. (2014). *Cambodia's Integrity System Remains Weak and Requires Significant Improvement*.
<https://www.transparency.org/en/press/cambodias-integrity-system-remains-weak-and-requires-significant-improvement>

Transparency International Cambodia. (2021). *CPI 2020 Press Release Cambodia*.
<https://www.ticambodia.org/cpi2020/>

Transparency International Indonesia. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi*.
<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>

U.S. Department of State. (2021). *Cambodia Business Advisory on High-Risk Investments and Interactions*. <https://www.state.gov/cambodia-business->

advisory-on-high-risk-investments-and-interactions/

- U.S. Department Of State. (2022). *2022 Investment Climate Statements: Timor-Leste*. <https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/timor-leste/>
- United Nations. (2014). *Thematic Compilation of Relevant Information Submitted By Vietnam Article 6 UNCAC Preventive Anti-Corruption Body or Bodies*. https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/Vietnam.pdf
- United Nations. (2019). *The Anti-Corruption Commission in Timor-Leste Builds its Capacities to Investigate Corruption and Financial Crimes*. <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/29-the-anti-corruption-commission-in-timor-leste-builds-its-capacities-to-investigate-corruption-and-financial-crimes.html>
- United Nations Development Programme. (2021). *Starting a Career From Lockdown: The Impact of Covid-19 on Youth, Education and Employment in Timor-Leste*. <https://www.undp.org/timor-leste/blog/starting-career-lockdown-impact-covid-19-youth-education-and-employment-timor-leste>
- Universitas Lampung, Rahmawati, L., Bua, A. T., Dewi, T. K., Artikel, I., Ki, J. L., Pemanahan, A., Dan, H., Di, L., Dasar, S., Ertika, Y. O., Putra, M. J. A., Kurniaman, O., Fauziyah, S. L., Norra, B. I., Pengetahuan, I., Di, S., Dasar, S., Rosyidah, N., ... Wahyuni, S. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Bandar Lampung*. 9(1), 1–76.
- Usman, A. rani, Sulaiman, A., Zulyadi, T., & Nurdin, H. (2020). Komunikasi Politik Singapura (Studi Terhadap Adaptasi Budaya). *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran ISLAM*, 11(2), 269–280.
- Vasavakul, T. (2020). Vietnam Fights Corruption : Towards More Inclusive Initiatives ? *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 92, 1–10.
- Widana, I. W., & Muliani, P. L. (2020). *Uji Persyaratan Analisis* (T. Fiktorius (ed.)). Klik Media.
- Widana, I. W., Sumandya, I. W., & Suhardita, K. (2020). *Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN.
- Widyanto, A., & Ulfah, M. (2018). *Anti Korupsi* (F. Falah (ed.); Edisi Pert). Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Wilhelmus, O. R. (2018). *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan*

Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42.
<https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>

Wilkinson, M. (2021). *Timor-Leste Economy Grapples with Dual Impacts of Pandemic and Cyclone Seroja*. World Bank.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/10/timor-leste-economy-grapples-with-dual-impacts-of-pandemic-and-cyclone-seroja#:~:text=The economy is estimated to,transfers increased to support households>.

World Bank. (2020a). *Malaysia's Economy Expected to Contract Sharply Due to COVID-19 in 2020; Growth to Rebound in 2021: World Bank*.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/24/malaysias-economy-expected-to-contrast-sharply-due-to-covid-19-in-2020-growth-to-rebound-in-2021-world-bank>

World Bank. (2020b). *Philippines Economic Update: Braving the New Normal*.

World Bank. (2022). *New Financing to Support Cambodia's Economic Recovery and Long-Term Resilience*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/12/21/new-financing-to-support-cambodia-s-economic-recovery-and-long-term-resilience>

World Bank Group. (2018). *Timor-Leste Economic Report March 2018*.

Yen, H. H. (2020). *Current Issues In The Investigation, Prosecution And Adjudication Of Corruption Cases In Vietnam*. 132–137.

Yuliawan, D., & Wanniatie, V. (2021). Analisis Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 144–158.
<https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.300>

Yusuf, A. H., & Oyelakin, I. O. (2022). Impact of COVID-19 on Malaysian Economy: A Study of Consumer Product Manufacturing Firms. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, 49(1), 314–321.
<https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.1.37>